



# RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA P-RENJA TAHUN 2025



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

## KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RANCANGAN PERUBAHAN RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2025 telah dapat diselesaikan.

Penyusunan RANCANGAN PERUBAHAN RENJA ini dimaksudkan agar Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto dapat memberikan arah kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 kepada publik atas amanat yang diemban sekaligus mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan RANCANGAN PERUBAHAN RENJA ini kami sampaikan banyak terima kasih dan semoga apa yang telah kita perbuat ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat, pemerintah dan khususnya bagi lembaga Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto

Akhirnya saran dari para pengguna RANCANGAN PERUBAHAN RENJA ini akan menjadi bahan untuk perbaikan yang akan lebih menyempurnakan untuk penyusunan RANCANGAN PERUBAHAN RENJA di tahun-tahun mendatang

Mojokerto,       Maret 2025

KEPALA DP2KBP2 KAB.MOJOKERTO

SUGENG NURYADI, S.IP, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19681010 198903 1 008

## DAFTAR ISI

Pengantar . . . . .	i	
Daftar Isi . . . . .	ii	
Daftar Tabel . . . . .	iii	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang. . . . .	1	
1.2 Landasan Hukum . . . . .	2	
1.3 Maksud dan Tujuan . . . . .	6	
1.4 Sistematika Penulisan. . . . .	7	
<b>BAB II</b>	<b>EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2024</b>	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan sd Triwulan II . . . . .	10	
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Tahun 2024 . . . . .	63	
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD . . . . .	81	
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD . . . . .	83	
2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat . . . . .	114	
<b>BAB III</b>	<b>Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah. . . . .</b>	<b>117</b>
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP . . . . .</b>	<b>192</b>

## DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah – **hal 11**
- Tabel 2.1.1 : Evaluasi Renja Tahun 2024 (E-81) – **hal 30**
- Tabel 2.2 : Pencapaian kinerja Pelayanan DP2KBP2 – **hal 61**
- Tabel 2.2.1 : Analisa Capaian Kinerja 2024 - **hal 64**
- Tabel 2.2.2 : APE Menurut Kategori Nilai dari Tahun 2020 sd 2024 – **hal 66**
- Tabel 2.2.3 : KLA Menurut Kategori Nilai dari Tahun 2020 sd 2024 – **hal 68**
- Tabel 2.2.4 : Pencapaian Peserta KB Aktif di Kabupaten Mojokerto bulan Desember Tahun 2024 – **hal 70**
- Tabel 2.2.5 : Pencapaian Pesrta KB Aktif Per Mix Kontrasepsi – **hal 70**
- Tabel 2.2.6 : Perbandingan Prevalensi KB Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 sd 2024 – **hal 70**
- Tabel 2.2.7 : Prosentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif di Kabupaten Mojokerto – **hal 72**
- Tabel 2.2.9 : Nilai SAKIP dari Tahun 2021 sd 2024 – **hal 74**
- Tabel 2.2.10 : Nilai Prosentase Realisasi Anggaran DP2KBP2 dari Tahun 2021 – 2024 – **hal 75**
- Tabel 2.2.11 : Proyeksi Realisasi Anggaran sampai dengan Desember Tahun 2024 – **hal 76**
- Tabel 2.2.12 : Nilai IP ASN DP2KBP2 dari Tahun 2021 sd 2024 – **hal 80**
- Tabel 2.3 : Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun Anggaran 2025 – **hal 84**
- Tabel 2.4 : Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun Anggaran 2025 – **hal 114**
- Tabel 4.1 : Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah PAPBD Tahun Anggran 2025 – **hal 118**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Adapun proses penyusunan Rancangan Perubahan RENJA Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan Rancangan Perubahan RENJA, penyusunan Rancangan Awal Rancangan Perubahan RENJA, penyusunan Rancangan Perubahan RENJA, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Rancangan Perubahan RENJA dan penetapan Rancangan Perubahan RENJA.

Penyusunan Rancangan Perubahan RENJA Perangkat Daerah selalu berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, sub Kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Rancangan Perubahan RENJA Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Berkaitan dengan penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Rancangan Perubahan RENJA ini merupakan langkah untuk melaksanakan mandat yang diemban Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 64 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto.

Program Pemberdayaan Perempuan dengan upaya-upaya peningkatan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender dan anak melalui penguatan kelembagaan gender dan anak, meningkatkan kampanye anti trafiking dan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak serta penghapusan bentuk pekerjaan terburuk bagi anak dan mengeliminir berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak.

Sementara Program Keluarga Berencana merupakan upaya pokok dalam pengendalian jumlah penduduk melalui pengaturan kelahiran, pendewasaan usia kawin, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga juga merupakan strategi dalam upaya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dengan berorientasi pada kesehatan reproduksi dan penghormatan hak-hak reproduksi seseorang sebagai bagian integral pembangunan nasional.

Untuk itu baik Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan pelaksanaan pada tahun 2025.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto tahun 2025 adalah :

1. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah di ubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan daerah tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Instimewa Jogjakarta

- (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanakan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019. Didalamnya memuat kegiatan pengawasan dalam bentuk monitoring dan evaluasi PPRG dan fokus pengawasan urusan pemerintahan Bidang PP dan PA.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan APBD 2020. Didalamnya mencantumkan kewajiban bagi OPD untuk

menyusun analisis gender dan menuangkan dalam GBS serta dilampirkan dalam RKA.

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kondefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga (KKBPK);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutanaan Gender;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaga Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan daerah No.9 tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
31. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
32. Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 14 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021;
33. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
34. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
35. Keputusan Kelapa Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Nomor 188.45/1868/KEP/416-101/2021;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rancangan Perubahan RENJA Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto tahun 2025 dimaksudkan agar :

- a. Memberikan arah dan pedoman dalam melaksanakan tugas untuk menentukan kegiatan strategis di bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana sehingga program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun satu tahun.
- b. Mempermudah pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, para pemangku kepentingan (stakeholder), monitoring, analisis data, evaluasi/pemantapan program baik secara internal maupun eksternal.

- c. Memberikan informasi ke semua pihak yang berkepentingan untuk memiliki pandangan yang sama secara internal maupun eksternal.
- d. Menjadi acuan bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto dalam upaya mencapai prioritas peningkatan kualitas SDM.

Adapun tujuan disusunnya Rancangan Perubahan RENJA Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto tahun 2025 adalah untuk :

- a. Menjabarkan arahan Renstra Dinas P2KBP2 Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029 kedalam operasionalisasi program
- b. Menjabarkan Visi dan Misi Dinas P2KBP2 Kabupaten Mojokerto ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional serta kegiatan indikatif
- c. Menyediakan dokumen Rencana Kerja perangkat daerah sebagai acuan operasional program
- d. Menentukan strategi untuk peningkatan produktivitas dan menjamin efektifitas penggunaan sumber dana organisasi

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Dokumen Rancangan Perubahan RENJA Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2025 disusun dengan tata urut sebagai berikut :

### **Bab I PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian dengan ringkas, proses penyusunan, keterkaitan antara RENJA dengan dokumen RKPd, Renstra dengan RENJA K/L dan RENJA Provinsi/Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan penyusunan RAPBD.

## 1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang – undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang kewenangan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

## 1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Perubahan RENJA tahun 2025, rencana dan hubungannya dengan dokumen Renstra dan RPJMD serta isu strategis dan kaitannya dengan Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

## 1.4. Sistemmatika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rancangan Perubahan RENJA SKPD tahun 2025 serta susunan garis besar isi dokumen.

# **Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

2.1 Evaluasi pelaksanaan RENJA tahun lalu dan capaian Renstra memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun-1), mengacu pada APBD tahun berjalan.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK.

## 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Berisi uraian mengenai permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, dampaknya terhadap

pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terhadap pencapaian SPM dan MDGs (Millenium Development Goals).

#### 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisi uraian mengenai proses perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

#### 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun dari hasil pengumpulan informasi SKPD Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten.

### **Bab III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini berisi rumusan rencana program, kegiatan dan pagu dana indikatif yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran 2025 serta prakiraan maju Tahun Anggaran 2026.

### **Bab IV PENUTUP**

Bab ini berisi uraian tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Bab ini juga memuat kaidah pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2025.

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Anggaran yang tersedia untuk setiap Organisasi Perangkat Daerah pada setiap tahun anggaran di lakukan evaluasi antara anggaran dengan realisasi, dengan memperhatikan unsur ekonomis, efektif, dan efisien. Ekonomis diukur dengan masukan (*input*) anggaran dengan realisasi, sedangkan efisiensi dengan cara membandingkan antara *input* dengan *output*, dan efektifitas dengan cara membandingkan hasil (*outcome*) dengan target yang ditetapkan. Adapun ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto per tanggal 30 Desember 2024 sebesar **96,22 %** sebagai berikut :

Anggaran sebelum Perubahan APBD	Rp. 20.140.239.912,00
Refokusing PAPBD	Rp. <u>290.825.500,00 +</u>
Anggaran setelah Perubahan	Rp. 20.431.065.412,00
Realisasi	Rp. <u>19.657.817.756,00 -</u>
Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran	Rp. <u>773.247.656,00</u>

Sedangkan anggaran DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto pada TA. 2024 adalah sebesar Rp 20.431.065.412,00

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan RENJA dan pencapaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto sampai dengan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1

(Tabel T-C. 29 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024  
Kabupaten Mojokerto

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)

				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,28%	83,28%	83,28 (A)	83,19 (A)	83,19 (A)	83,78 (A)	-	-
				Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai Target	90%	90%	90%	90%	100%	90%	270%	90%

			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok	6 Dok	300%
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	100%	2 Lap	6 Lap	300%
			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah</b>	<b>86%</b>	<b>85%</b>	<b>85%</b>	<b>85%</b>	<b>100%</b>	<b>85%</b>	<b>255%</b>	<b>264%</b>
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangan	36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	100%	36 Orang/bulan	108 Orang/bulan	300%
			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>IP ASN Perangkat Daerah</b>	<b>86,15%</b>	<b>86,15</b>	<b>86,15%</b>	<b>86,15%</b>	<b>100%</b>	<b>86,15%</b>	<b>258,45%</b>	<b>300%</b>
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Adribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai DP2KBP2 yang mendapatkan pakaian dinas	-	-	-	-	-	-	-	
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>100%</b>	<b>90%</b>	<b>270%</b>	<b>300%</b>
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14 Paket	14 Paket	14 Paket	100%	14 Paket	42 Paket	300%
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman yang Disediakan	168 Paket	168 Paket	168 Paket	168 Paket	100%	168 Paket	504 Paket	300%

				Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	12 Paket	300%
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	18 Dokumen	300%
				Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	12 Paket	300%
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	300%
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144 Laporan	119 Laporan	119 Laporan	119 Laporan	100%	119 Laporan	357 Laporan	300%
				<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>100%</b>	<b>90%</b>	<b>270%</b>	<b>300%</b>
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	300%

			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Selama 12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	36 Laporan	300%
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>100%</b>	<b>90%</b>	<b>270%</b>	<b>300%</b>
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	182 Unit	182 Unit	182 Unit	182 Unit	100%	182 Unit	546 unit	300%
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Gedung	3 Gedung	3 Gedung	3 Gedung	100%	3 Gedung	9 Gedung	300%
			Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 Unit	21 Unit	21 Unit	21 Unit	100%	21 Unit	63 Unit	300%
			<b>Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</b>	<b>Prosentase kelembagaan daerah yang responsif gender</b>	<b>66,67%</b>	<b>73,68%</b>	<b>73,68%</b>	<b>73,68%</b>	<b>100%</b>	<b>73,68%</b>	<b>221%</b>	<b>300%</b>
			<b>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota</b>	<b>Jumlah OPD yang melaksanakan anggaran responsif gender</b>	<b>86 OPD</b>	<b>54 OPD</b>	<b>54 OPD</b>	<b>54 OPD</b>	<b>100%</b>	<b>86 OPD</b>	<b>194 OPD</b>	<b>359%</b>

			Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	57 Dok	57 Dok	57 Dok	57 Dok	100%	57 Dok	171 Dok	300%
			Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	36 PD	36 PD	36 PD	36 PD	100%	36 PD	108 PD	300%
			<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah organisasi wanita dan lembaga penyedia layanan yang mendapat pembinaan</b>	90 Orang	6 gugus tugas PPA desa	6 gugus tugas PPA desa	6 gugus tugas PPA desa	100%	90 Orang	-	-
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	57 Lembaga	57 Lembaga	57 Lembaga	57 Lembaga	100%	57 Lembaga	171 Lembaga	300%
			Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	3 Dok	300%

			<b>Program Perlindungan Perempuan</b>	<b>Prosentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>300%</b>	<b>3%</b>
			<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah lintas sektor yang berperan aktif dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan atau TPPO</b>	<b>65 Orang</b>	<b>14 Mitra kerja/  Jejaring</b>	<b>14 Mitra kerja/  Jejaring</b>	<b>14 Mitra kerja/  Jejaring</b>	<b>100%</b>	65 Orang	-	-
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Ko	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	3 Dok	300%
			<b>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Mitra Kerja / Jejaring yang Dapat Bersinergi dengan P2TP2A</b>	<b>15 mitra kerja / jejaring</b>	<b>70 Org</b>	<b>70 Org</b>	<b>70 Org</b>	<b>100%</b>	<b>14 mitra kerja / jejaring</b>	-	-
			Penyedia Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	50 Org	50 Org	50 Org	50 Org	100%	150 Org	-	300%

			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	100%	3 Layanan	9 Layanan	300%
			<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah kebutuhan rumah aman dan jumlah petugas yang tercukupi dan cakap dalam pendampingan</b>	<b>43 Orang</b>	<b>43 Org</b>	<b>43 Org</b>	<b>43 Org</b>	<b>100%</b>	<b>43 Orang</b>	<b>129 Org</b>	<b>300%</b>
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	36 Orang	36 Orang	36 Orang	36 Orang	100%	36 Orang	108 Orang	300%
			<b>Program Peningkatan Kualitas Keluarga</b>	<b>Prosentase kepala desa yang mendapatkan pemahaman tentang kebijakan pelaksanaan PUG di desa</b>	<b>49,34%</b>	<b>16,45%</b>	<b>16,45%</b>	<b>16,45%</b>	<b>100%</b>	<b>38,89%</b>	<b>71,79%</b>	<b>1,45%</b>
			<b>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah</b>	<b>Jumlah kepala desa yang memahami kebijakan pelaksanaan PUG tingkat desa</b>	<b>72 orang</b>	<b>72 Org</b>	<b>72 Org</b>	<b>72 Org</b>	<b>100%</b>	<b>72 Orang</b>	<b>216 Org</b>	<b>300%</b>

			Advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan perlindungan anak kewenangan Kab/kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	57 Perangkat	57 Perangkat	57 Perangkat	57 Perangkat	100%	57 Perangkat	171 Perangkat	300%
			<b>Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak</b>	<b>Prosentase OPD yang memiliki data terpilah gender dan anak</b>	93,75%	89,58%	89,58%	89,58%	100%	91,67%	270%	2,80%
			<b>Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyaji Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Profil Gender dan Anak yang Disusun</b>	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku	100%	1 buku	3 Buku	300%
			Penyediaan data gender dan anak di kewenangan kab/kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	3 Dok	300%
			<b>Program Pemenuhan Hak Anak</b>	<b>Prosentase kecamatan layak anak</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
				<b>Prosentase desa kelurahan layak anak</b>	72,37%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%

			<b>Pelebagaan PHA dan Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah kecamatan dan desa yang memahami PHA</b>	<b>136 Orang</b>	<b>80 Org</b>	<b>80 Org</b>	<b>80 Org</b>	<b>100%</b>	<b>136 Orang</b>	<b>296 Org</b>	<b>218%</b>
			Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kab/kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	27 Organisasi	27 Organisasi	27 Organisasi	27 Organisasi	100%	27 Organisasi	81 Organisasi	300%
			Koordinasi dan sinkronisasi pelebagaan pemenuhan hak anak kewenangan kab/kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	3 Dok	300%
			<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah jejaring yang bersinergi dalam pemenuhan hak anak di Kabupaten Mojokerto</b>	<b>175 orang</b>	<b>175 Org</b>	<b>175 Org</b>	<b>175 Org</b>	<b>100%</b>	<b>175 Orang</b>	<b>525 Org</b>	<b>300%</b>
			Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kab/kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	95 orang	95 Org	95 Org	95 Org	100%	95 Orang	285 Org	300%

			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	300%
			<b>Program Perlindungan Khusus Anak</b>	<b>Prosentase korban anak dan ABH (anak yang berhadapan dengan hukum) yang mendapatkan layanan</b>	<b>41,82%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>300%</b>	<b>300%</b>
			<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah lintas sektor dan remaja yang berperan aktif dalam pencegahan terhadap anak atau TPPO</b>	<b>60 Orang</b>	60 Orang	60 Orang	60 Orang	100%	60 Orang	180 Orang	300%
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Perangkat	15 Perangkat	15 Perangkat	15 Perangkat	100%	15 Perangkat	45 Perangkat	300%
			<b>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Jejaring dan petugas yang bersinergi dengan P2TP2A dan anak korban kekerasan yang mendapat pelayanan</b>	<b>125 Orang</b>	<b>125 Orang</b>	<b>125 Orang</b>	<b>125 Orang</b>	<b>100%</b>	<b>125 Orang</b>	<b>375 Org</b>	<b>300%</b>

			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	100%	5 Orang	15 Orang	300%
			Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kab/kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Layanan	10 Layanan	10 Layanan	10 Layanan	100%	10 Layanan	30 Layanan	300%
			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	300%
			<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Kepala Desa yang Memahami Desa Layak Anak</b>	<b>108 Orang</b>	<b>108 Orang</b>	<b>108 Orang</b>	<b>108 Orang</b>	<b>100%</b>	<b>108 Orang</b>	<b>324 Org</b>	<b>300%</b>
			Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kab/kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	300%

				<b>Program Pengendalian Penduduk</b>	<b>Prosentase Data Program Bangga Kencana dan Data Keluarga yang dilaporkan</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	300%
				<b>Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b>	<b>Jumlah Petugas KKBPK dan Lintas Sektor yang Melaksanakan Koordinasi Program KKBPK</b>	100 Org	100 Org	100 Org	100 Org	100%	100 orang	300 Org	300%
				Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Petugas KKBPK dan Lintas Sektor yang Melaksanakan Koordinasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana )	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	300%
				<b>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Perkiraan Pengendalian Penduduk Tahun 2021 yang Dipetakan</b>	1.169.760 jiwa	1.169.760 jiwa	1.170.748 jiwa	1.170.748 jiwa	100%	1.169.760 jiwa	3.510.268 Jiwa	300%
				Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	38 Unit	38 Unit	38 Unit	38 Unit	100%	38 Unit	114 Unit	300%
				Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	300%

			Lapangan dan Pelayanan KB	Lapangan dan Pelayanan KB								
			Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	300%
			Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	300%
			<b>Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</b>	<b>Prosentase PUS yang mendapat pelayanan Keluarga Berencana</b>	<b>80,80%</b>	<b>80,80%</b>	<b>80,80%</b>	<b>80,80%</b>	<b>100%</b>	<b>80,80%</b>	<b>242,40%</b>	<b>300%</b>
			<b>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>Jumlah media komunikasi program KKBPK</b>	<b>2 Jenis media KIE</b>	<b>2 Jenis media KIE</b>	<b>2 Jenis media KIE</b>	<b>2 Jenis media KIE</b>	<b>100%</b>	<b>2 Jenis media KIE</b>	<b>6 Jenis media KIE</b>	<b>300%</b>
			Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	1 Organisasi	1 Organisasi	1 Organisasi	1 Organisasi	100%	1 Organisasi	3 Organisasi	300%

			Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	6 Dokumen	300%
			Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (MiniloK)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	12 Laporan	300%
			Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK (DAK Non Fisik)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	18 Balai Penyuluh	18 Balai Penyuluh	18 Balai Penyuluh	18 Balai Penyuluh	100%	18 balai penyuluh	54 Balai penyuluh	300%
			Pengendalian Program KKBPK (DAK Non Fisik)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	6 Laporan	300%

				<b>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</b>	<b>Jumlah PLKB yang Mendapat Pembinaan Program KKBPK</b>	<b>60 Orang</b>	<b>60 Org</b>	<b>60 Org</b>	<b>60 Org</b>	<b>100%</b>	<b>60 Orang</b>	<b>180 Org</b>	<b>300%</b>
				Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	1 Organisasi	1 Organisasi	1 Organisasi	1 Organisasi	100%	1 Organisasi	3 Organisasi	300%
				Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	9 Unit	300%
				Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana / Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB / PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	300%
				Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (DAK NON FISIK)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1828 Orang	1828 Orang	1828 Orang	1828 Orang	100%	1828 Orang	5484 Orang	300%

			<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi yang terdistribusikan serta pelaksanaan pelayanan KB di Kabupaten Mojokerto yang terlayani sesuai SOP</b>	<b>46 Faskes</b>	<b>46 Faskes</b>	<b>46 Faskes</b>	<b>46 Faskes</b>	<b>100%</b>	<b>46 Faskes</b>	<b>138 Faskes</b>	<b>300%</b>
			Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jaringannya (DAK NON FISIK)	Jumlah pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi yang terdistribusikan serta pelaksanaan pelayanan KB di Kabupaten Mojokerto yang terlayani sesuai SOP	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	6 Laporan	300%
			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (APBD DAN DAK NON FISIK BOKB)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2229 Orang	2229 Orang	2229 Orang	2229 Orang	100%	2229 Orang	6687 Orang	300%
			Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB (DAK FISIK)	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	6 Unit	18 Unit	300%
			Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Pelayanan KB yang Dapat Ditingkatkan Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	43 Faskes	42 Faskes	42 Faskes	42 Faskes	100%	43 Faskes	127 faskes	295%
			Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	100%

			<b>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b>	<b>Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang Mensosialisasikan Program KKBPK</b>	<b>1.828 PPKBD dan Sub PPKBD</b>	<b>1.828 PPKBD dan Sub PPKBD</b>	<b>1.828 PPKBD dan Sub PPKBD</b>	<b>1.828 PPKBD dan Sub PPKBD</b>	<b>100%</b>	<b>1.828 PPKBD dan Sub PPKBD</b>	<b>5.484 kader PPKBD dan Sub PPKBD</b>	<b>300%</b>
			Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	380%
			Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB (DAK NON FISIK)	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	38 Kampung KB	38 Kampung KB	38 Kampung KB	38 Kampung KB	100%	38 Kampung KB	114 Kampung KB	300%
			<b>Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</b>	<b>Prosentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif</b>	<b>96,96%</b>	<b>96,96%</b>	<b>96,96%</b>	<b>96,96%</b>	<b>100%</b>	<b>96,96%</b>	<b>291%</b>	<b>300%</b>
			<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Jumlah Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R yang Mendapat Pembinaan</b>	<b>1.066 Kelompok</b>	<b>1.066 Kelompok</b>	<b>1.066 Kelompok</b>	<b>1.066 Kelompok</b>	<b>100%</b>	<b>1.066 Kelompok</b>	<b>3.198 kelompok</b>	<b>300%</b>
			Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita)	3 Kelompok	3 Kelompok	3 Kelompok	3 Kelompok	100%	3 Kelompok	9 Kelompok	300%

			(BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	(BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk								
			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	30 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit	100%	30 Unit	90 Unit	300%
			Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	300%
			Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	100%	20 Orang	600 org	300%

			Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2586 Orang	2586 Orang	2586 Orang	2586 Orang	100%	2586 Orang	7758 Orang	300%
			Penyerasian Kebijakan Dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	100%	18 Dokumen	54 Dokumen	300%

**EVALUASI RENJA TAHUN 2024 (E.81)**

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026 (akhir periode renstra perangkat daerah)	Realisasi capaian kinerja rentra perangkat daerah sampai dengan renja perangkat daerah tahun lalu (2022)	Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2022) yang di evaluasi	Realisasi Kinerja Pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja Dan anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (akhir tahun pelaksanaan renja)	Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi anggaran renstra perangkat daerah s/d 2022 (%)	Permasalahan
							I		II		III		IV					
							K	R	K	R	K	R	K	R				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana		Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE)(Nilai)			APE Nindya												

2		[PROGRAM] 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUT AMAAN GENDER DAN PEMBERDAYA AN PEREMPUAN	Persentase Kelembagaan Daerah yang Responsif Gender(%)		310.000. 000,00	570.905.86 5,00	82,14		0	22.899.1 00,00	0,00	20.325.7 00,00	0,00	13.407.7 00,00	73. 68	59.926.0 00,00	73,68	116.558. 500,00					
3		[KEGIATAN] 2.08.02.2.01 Pelebagaan Pengarusutam aan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Jumlah OPD yang Melaksanakan Anggaran Responsif Gender(OPD)			67.891.850 ,00	58,00	35.000.0 00,00	0,00	1.479.00 0,00	0,00	575.000, 00	58,00	8.607.70 0,00	0,0 0	22.964.2 00,00	58,00	33.625.9 00,00					
4		[SUB KEGIATAN] 2.08.02.2.01.0 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota(D okumen)				57,00	10.000.0 00,00	0,00	739.500, 00	0,00	0,00	57,00	8.607.70 0,00	0,0 0	0,00	100,0 0	9.347.20 0,00					
4		[SUB KEGIATAN] 2.08.02.2.01.0 3 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota(P erangkat Daerah)				36,00	25.000.0 00,00	0,00	739.500, 00	0,00	575.000, 00	36,00	0,00	0,0 0	22.964.2 00,00	100,0 0	24.278.7 00,00					

3		[KEGIATAN] 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PEKA dan Perempuan Korban Kekerasan yang Dilatih Berwirausaha(Orang)			0,00	40,00		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00					
3		[KEGIATAN] 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Wanita dan Lembaga Penyedia Layanan yang Mendapat Pembinaan(Orang)			503.014.01 5,00	90,00	84.813.1 25,00	0,00	214201 00	0,00	1975070 0	40,00	4800000	50, 00	3696180 0	90,00	82.932.6 00,00					
4		[SUB KEGIATAN] 2.08.02.2.03.0 1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan(Lembaga)				57,00	24.813.1 25,00	57,0 0	20.046.1 00,00	0,00	3.780.50 0,00	0,00	600.000, 00	0,0 0	0,00	100,0 0	24.426.6 00,00					

4	[SUB KEGIATAN] 2.08.02.2.03.0 2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas(Orang)				120,00	50.000.000,00	0,00	634.500,00	0,00	7.375.000,00	40,00	4.200.000,00	80,00	36.961.800,00	100,00	49.171.300,00				
4	[SUB KEGIATAN] 2.08.02.2.03.0 3 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia(Dokumen)				1,00	10.000.000,00	0,00	739.500,00	1,00	8.595.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	9.334.700,00				
2	[PROGRAM] 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan(%)	395.499.000,00	371.211.400,00	100,00			0	7.670.700,00	0,00	58.884.400,00	0,00	50.590.500,00	100	63912900	100,00	181.058.500,00				
3	[KEGIATAN] 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lintas Sektor yang Berperan Aktif dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan/TPPO(Orang)		116.445.500,00	65,00	50.000.000,00	0,00	4018900	0,00	20000000	50,00	9200000	15,00	16000000	65,00	49.218.900,00					

4	[SUB KEGIATAN] 2.08.03.2.01.0 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota(Dokumen)				1,00	50.000.000,00	0,23	4.018.900,00	0,30	20.000.000,00	0,25	9.200.000,00	0,22	16.000.000,00	100,00	49.218.900,00				
3	[KEGIATAN] 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Mitra Kerja/Jejaring yang dapat Bersinergi dengan P2TP2A(Mitra Kerja/Jejaring)			234.945.500,00	14,00	124.243.450,00	0,00	3651800	0,00	29386500	10,00	41015500	4,00	47912900	14,00	121.966.700,00				
4	[SUB KEGIATAN] 2.08.03.2.02.0 1 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan(Orang)				54,00	99.673.750,00	0,00	1.804.600,00	25,00	18.361.500,00	0,00	37.482.500,00	29,00	41.483.900,00	100,00	99.132.500,00				

4	[SUB KEGIATAN] 2.08.03.2.02.0 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota(Layanan)				3,00	24.569.700,00	1,00	1.847.200,00	1,00	11.025.000,00	0,00	3.533.000,00	1,00	6.429.000,00	100,00	22.834.200,00				
3	[KEGIATAN] 2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebutuhan Rumah Aman dan Jumlah Petugas yang Tercukupi dan Cakap dalam Pendampingan(Orang)			19.820.400,00	43,00	10.000.000,00	0,00	0	0,00	9.497.900,00	43,00	375.000,00	0,00	0	43,00	9.872.900,00				
4	[SUB KEGIATAN] 2.08.03.2.03.0 2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas(Orang)				36,00	10.000.000,00	36,00	0,00	0,00	9.497.900,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	100,00	9.872.900,00				

2		[PROGRAM] 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kepala Desa yang Mendapatkan Pemahaman tentang Kebijakan Pelaksanaan PUG di Desa(%)	100.000. 000,00	11.314.250 ,00	49,34		0	739.500, 00	0,00	0,00	0,00	925.000, 00	10 0	0	100,0 0	1.664.50 0,00					
3		[KEGIATAN] 2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Ko ta	Jumlah Kepala Desa yang Memahami Kebijakan Pelaksanaan PUG Tingkat Desa(Orang)		11.314.250 ,00	72,00	1.792.50 0,00	0,00	739.500, 00	0,00	0	72,00	925.000, 00	0,0 0	0	72,00	1.664.50 0,00					
4		[SUB KEGIATAN] 2.08.04.2.01.0 1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota(P erangkat Daerah)			57,00	1.792.50 0,00	0,00	739.500, 00	0,00	0,00	57,00	925.000, 00	0,0 0	0,00	100,0 0	1.664.50 0,00					
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Keluarga Berenca na		Kabupaten Layak Anak (KLA)(Nilai)			KLA																

2		[PROGRAM] 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD yang Memiliki Data Terpilah Gender dan Anak(%)	100.000. 000,00	48.776.400 ,00	93,75		0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.00 0,00	10 0	2228940 0	100,0 0	24.489.4 00,00				
3		[KEGIATAN] 2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Ko ta	Jumlah Profil Gender dan Anak yang Disusun(Buku)		48.776.400 ,00	1,00	25.000.0 00,00	0,00	0	0,00	0	0,00	2200000	1,0 0	2228940 0	1,00	24.489.4 00,00				
4		[SUB KEGIATAN] 2.08.05.2.01.0 1 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota yang tersedia(Dokumen )			1,00	25.000.0 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	2.200.00 0,00	0,7 5	22.289.4 00,00	100,0 0	24.489.4 00,00				
2		[PROGRAM] 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kecamatan Layak Anak(%)	368.267. 400,00	153.023.20 0,00	38,89		0	7.755.00 0,00	0,00	26.898.9 00,00	0,00	25.818.0 00,00	10 0	1622620 0	100,0 0	76.698.1 00,00				
3		[KEGIATAN] 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerinta h, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Ko ta	Jumlah Kecamatan dan Desa yang Memahami PHA(Orang)		117.795.00 0,00	40,00	59.760.0 00,00	0,00	775500 0	0,00	2689890 0	40,00	2391800 0	0,0 0	0	40,00	58.571.9 00,00				

4	[SUB KEGIATAN] 2.08.06.2.01.0 1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha(Organisasi)				27,00	9.880.00 0,00	27,0 0	0,00	0,00	4.759.00 0,00	0,00	4.999.00 0,00	0,0 0	0,00	100,0 0	9.758.00 0,00				
4	[SUB KEGIATAN] 2.08.06.2.01.0 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota(Dokumen)				1,00	49.880.0 00,00	0,00	7.755.00 0,00	0,00	22.139.9 00,00	1,00	18.919.0 00,00	0,0 0	0,00	100,0 0	48.813.9 00,00				
3	[KEGIATAN] 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Jejaring yang Bersinergi dalam Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Mojokerto(Orang)			35.228.200 ,00	175,00	19.777.0 00,00	0,00	0	0,00	0	175,00	1900000	0,0 0	1622620 0	175,0 0	18.126.2 00,00				

4	[SUB KEGIATAN] 2.08.06.2.02.0 1 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota(Orang)				95,00	9.868.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	8.260.000,00	100,00	8.260.000,00					
4	[SUB KEGIATAN] 2.08.06.2.02.0 3 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota(Dokumen)				1,00	9.909.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.900.000,00	0,00	7.966.200,00	100,00	9.866.200,00					
		Persentase Desa / Kelurahan Layak Anak(%)				10,56		0		0,00		0,00		100								
3	[KEGIATAN] 2.08.06.2.01 Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan dan Desa yang Memahami PHA(Orang)			117.795.000,00	40,00	59.760.000,00	0,00	7755000	0,00	26898900	40,00	23918000	0,00	0	40,00	58.571.900,00					

4	[SUB KEGIATAN] 2.08.06.2.01.0 1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha(Organisasi)				27,00	9.880.00 0,00	27,0 0	0,00	0,00	4.759.00 0,00	0,00	4.999.00 0,00	0,0 0	0,00	100,0 0	9.758.00 0,00					
4	[SUB KEGIATAN] 2.08.06.2.01.0 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota(Dokumen)				1,00	49.880.0 00,00	0,00	7.755.00 0,00	0,00	22.139.9 00,00	1,00	18.919.0 00,00	0,0 0	0,00	100,0 0	48.813.9 00,00					
3	[KEGIATAN] 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Jejaring yang Bersinergi dalam Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Mojokerto(Orang)			35.228.200 ,00	175,00	19.777.0 00,00	0,00	0	0,00	0	175,00	1900000	0,0 0	1622620 0	175,0 0	18.126.2 00,00					

4		[SUB KEGIATAN] 2.08.06.2.02.01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota(Orang)			95,00	9.868.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	8.260.000,00	100,00	8.260.000,00					
4		[SUB KEGIATAN] 2.08.06.2.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota(Dokumen)			1,00	9.909.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.900.000,00	0,00	7.966.200,00	100,00	9.866.200,00					
2		[PROGRAM] 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Korban Anak dan ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) yang Mendapatkan Layanan(%)	590.489.000,00	342.731.900,00	41,82		0	14.400.000,00	0,00	42.537.000,00	0,00	62.697.800,00	10	18750000	100,00	138.384.800,00					
3		[KEGIATAN] 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lintas Sektor dan Remaja yang Berperan Aktif dalam Pencegahan terhadap Anak/TPPO(Orang)		36.917.000,00	60,00	9.861.000,00	0,00	0	0,00	7803000	20,00	1675000	40,00	0	60,00	9.478.000,00					

4	[SUB KEGIATAN] 2.08.07.2.01.0 1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota(P erangkat Daerah)				15,00	9.861.00 0,00	0,00	0,00	0,00	7.803.00 0,00	15,00	1.675.00 0,00	0,0 0	0,00	100,0 0	9.478.00 0,00				
3	[KEGIATAN] 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jejaring dan Petugas yang Bersinergi dengan P2TP2A dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapat Pelayanan(Orang)			288.199.90 0,00	125,00	120.615. 000,00	0,00	144000 00	0,00	2605900 0	100,00	6102280 0	25, 00	1875000 0	125,0 0	120.231. 800,00				
4	[SUB KEGIATAN] 2.08.07.2.02.0 1 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota(O rang)				5,00	9.965.00 0,00	0,00	0,00	5,00	9.834.00 0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100,0 0	9.834.00 0,00				

4	[SUB KEGIATAN] 2.08.07.2.02.0 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota(L ayanan)				10,00	50.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	49.197.800,00	1,30	1.200.000,00	100,00	50.397.800,00				
4	[SUB KEGIATAN] 2.08.07.2.02.0 4 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota(D okumen)				1,00	60.000.000,00	0,00	14.400.000,00	0,00	16.225.000,00	0,75	11.825.000,00	0,25	17.550.000,00	100,00	60.000.000,00				
3	[KEGIATAN] 2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kepala Desa yang Memahami Desa Layak Anak(Orang)			17.615.000,00	108,00	9.735.000,00	0,00	0	0,00	8675000	108,00	0	0,00	0	108,00	8.675.000,00				

4		[SUB KEGIATAN] 2.08.07.2.03.0 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota(L apran)				18,00	9.735.000,00	0,00	0,00	18,00	8.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8.675.000,00					
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana		Prevalensi KB Aktif(%)				80,57																
2		[PROGRAM] 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Data Program Bangga Kencana dan Data Keluarga yang Dilaporkan(%)			1.821.606.000,00	100,00		0	27.600.700,00	0,00	419.023.600,00	0,00	542.498.000,00	100	456178700	100,00	1.445.301.000,00					

3		[KEGIATAN] 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Ko ta dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Petugas KKBPK dan Lintas Sektor yang Melaksanakan Koordinasi Program Bangga Kencana(Orang)			167.124.70 0,00	100,00	4.420.00 0,00	0,00	0	0,00	4420000	100,00	0	0,0 0	0	100,0 0	4.420.00 0,00					
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.02.2.01.1 5 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)(Lapora n)				1,00	4.420.00 0,00	0,00	0,00	1,00	4.420.00 0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	100,0 0	4.420.00 0,00					
3		[KEGIATAN] 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Ko ta	Jumlah Perkiraan Pengendalian Penduduk Tahun 2021 yang Dipetakan(Jiwa)			1.654.481. 300,00	##### #####	1.443.76 9.850,00	0,00	276007 00	0,00	4146036 00	##### ####	5424980 00	0,0 0	4561787 00	#### ####	1.440.88 1.000,00					
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.02.2.02.0 8 Membentuk Rumah Data Kependuduka n di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga				38,00	24.754.0 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	5.606.90 0,00	0,0 0	18.667.8 00,00	100,0 0	24.274.7 00,00					

		KKBPK di Sektor Lain	Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk(Unit)																				
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.02.2.02.0 9 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga(Laporan)					1,00	64.200.000,00	0,12	8.220.000,00	0,00	12.140.000,00	0,66	21.848.100,00	0,22	20.988.100,00	100,00	63.196.200,00				
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.02.2.02.1 2 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Pelaksanaan Pendataan yang Memahami Teknis Pendataan(orang)					80,00	232.800.000,00	0,00	0,00	20,00	12.600.000,00	40,00	103.800.000,00	20,00	116.400.000,00	100,00	232.800.000,00				
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.02.2.02.1 3 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB(Dokumen)					2,00	1.097.569.850,00	0,00	0,00	0,00	389.863.600,00	1,00	411.243.000,00	1,00	295.702.800,00	100,00	1.096.809.400,00				
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.02.2.02.1 4 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan(Laporan)					1,00	24.446.000,00	1,00	19.380.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420.000,00	100,00	23.800.700,00				
2		[PROGRAM] 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase PUS yang Mendapat Pelayanan Keluarga Berencana(%)				#####	80,57		0	524.560.200,00	0,00	1.328.046.894,00	0,00	2.234.760.750,00	80.55	2603471442	80,55	6.690.839.286,00				

3	[KEGIATAN] 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Media Komunikasi Program Bangga Kencana(Media Komunikasi)			2.267.853. 590,00	50,00	1.086.90 0.000,00	0,00	323059 00	0,00	3421476 94	25,00	2466325 00	25, 00	4607629 50	50,00	1.081.84 9.044,00					
4	[SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.01.0 1 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja(Organisasi)				12,00	120.000. 000,00	0,00	4.106.00 0,00	6,00	39.702.1 00,00	6,00	36.020.0 00,00	0,0 0	38.675.0 00,00	100,0 0	118.503. 100,00					
4	[SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.01.0 4 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang(Dokumen)				2,00	175.000. 000,00	2,00	28.199.9 00,00	0,00	65.475.2 00,00	0,00	42.265.3 00,00	0,0 0	36.442.4 00,00	100,0 0	172.382. 800,00					

4	[SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.01.0 6 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)(Laporan )				2,00	234.000.000,00	0,00	0,00	1,00	56.484.000,00	1,00	56.484.000,00	0,00	120.798.000,00	100,00	233.766.000,00				
4	[SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.01.0 7 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)(Laporan)				1,00	477.900.000,00	0,00	0,00	0,50	141.540.400,00	0,25	111.863.200,00	0,25	223.999.550,00	100,00	477.403.150,00				
4	[SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.01.0 8 Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK(Laporan)				1,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,50	38.945.994,00	0,00	0,00	0,50	40.848.000,00	100,00	79.793.994,00				
3	[KEGIATAN] 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah PLKB yang Mendapat Pembinaan Program Bangga Kencana(Orang)			4.930.423.492,00	60,00	2.131.238.200,00	0,00	313114600	0,00	297759100	30,00	731641250	30,00	784988392	60,00	2.127.503.342,00				

4		[SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.02.0 1 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB(Organisasi)				1,00	1.393.000.000,00	0,25	299.332.800,00	0,25	61.010.000,00	0,25	474.400.000,00	0,25	558.209.392,00	100,00	1.392.952.192,00				
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.02.0 2 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia(Unit)				3,00	99.764.200,00	0,00	0,00	0,00	42.977.000,00	2,00	10.670.000,00	1,00	44.379.000,00	100,00	98.026.000,00				
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.02.0 3 Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)(Laporan)				1,00	30.474.000,00	1,00	13.781.800,00	0,00	11.372.100,00	0,00	3.371.250,00	0,00	0,00	100,00	28.525.150,00				
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.02.0 4 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)(Orang)				1.828,00	608.000.000,00	0,00	0,00	1.828,00	182.400.000,00	0,00	243.200.000,00	0,00	182.400.000,00	100,00	608.000.000,00				



4		[SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.03.0 6 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB(Unit)				6,00	1.436.129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	536.697.000,00	0,00	800.646.000,00	100,00	1.337.343.000,00				
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.03.0 8 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya(Laporan)				1,00	23.700.000,00	0,25	4.450.000,00	0,25	9.600.000,00	0,50	9.550.000,00	0,00	0,00	100,00	23.600.000,00				
3		[KEGIATAN] 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang Mensosialisasikan Program Bangga Kencana(PPKBD dan Sub PPKBD)			1.303.928.000,00	1.828,00	623.000.000,00	0,00	150871600	0,00	241856600	1.829,00	64700000	0,00	164738300	1.829,00	622.166.500,00				
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.04.0 2 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB(Dokumen)				1,00	9.000.000,00	0,00	0,00	1,00	8.989.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	8.989.600,00				

4		[SUB KEGIATAN] 2.14.03.2.04.0 3 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB(Kampung)	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB(Kampung)				38,00	614.000.000,00	0,00	150.871.600,00	18,00	232.867.000,00	18,00	64.700.000,00	2,00	164.738.300,00	100,00	613.176.900,00					
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana		Prosentase Keluarga yang ikut kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(%)				72,97																
2		[PROGRAM] 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif(%)			9.341.467.200,00	97,86		0	557.245.800,00	0,00	558.693.200,00	0,00	2.624.988.500,00	96,96	2187056500	96,96	5.927.984.000,00					
3		[KEGIATAN] 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R yang Mendapat Pembinaan(Kelompok)			9.015.206.700,00	1.066,00	5.937.042.000,00	0,00	557245800	0,00	558693200	1.066,00	2624988500	0,00	2187056500	1.066,00	5.927.984.000,00					

4	[SUB KEGIATAN] 2.14.04.2.01.0 1 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk(Kelompok)					3,00	19.921.000,00	3,00	14.185.800,00	0,00	5.632.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	19.818.500,00					
4	[SUB KEGIATAN] 2.14.04.2.01.0 2 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)(Unit)					2,00	360.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	352.470.000,00	0,00	0,00	100,00	352.470.000,00					

4	[SUB KEGIATAN] 2.14.04.2.01.0 3 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)( Laporan)				1,00	9.921.00 0,00	0,00	0,00	1,00	9.756.70 0,00	0,00	0,00	0,0 0	66.000,0 0	100,0 0	9.822.70 0,00				
4	[SUB KEGIATAN] 2.14.04.2.01.0 4 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)( Orang)				20,00	106.521. 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	90.636.8 00,00	0,0 0	14.720.5 00,00	100,0 0	105.357. 300,00				
4	[SUB KEGIATAN] 2.14.04.2.01.0 5 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)( Orang)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)( Orang)				2.586,0 0	5.430.60 0.000,00	2.58 6,00	543.060. 000,00	0,00	543.060. 000,00	0,00	2.172.24 0.000,00	0,0 0	2.172.24 0.000,00	100,0 0	5.430.60 0.000,00				

		PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPP KS)																				
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.04.2.01.09 Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)(Dokumen)			18,00	10.079.000,00	0,00	0,00	0,00	243.800,00	18,00	9.641.700,00	0,00	30.000,00	100,00	9.915.500,00					
3		[KEGIATAN] 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Mitra Kerja yang Mendapatkan Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(Orang)		326.260.500,00	50,00		0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00					

1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih dan Transparan		Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah(Nilai)					52,00													
2		[PROGRAM] 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah(nilai)			#####	84,28 (A)	0	590.298.720,00	0,00	1.967.936.878,00	0,00	1.193.134.380,00	84,42	1594950299	84,42	5.346.320.277,00				
3		[KEGIATAN] 2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Indikator Program Perencanaan Daerah yang Tercapai Sesuai Target(%)			25.079.800,00	90,00	12.700.000,00	0,00	2399800	0,00	0	90,00	6574800	0,00	3000200	90,00	11.974.800,00			
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(Dokumen)				2,00	7.500.000,00	1,00	1.499.800,00	0,00	0,00	1,00	4.875.000,00	0,00	900.000,00	100,00	7.274.800,00			
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)				8,00	5.200.000,00	4,00	900.000,00	0,00	0,00	4,00	1.699.800,00	0,00	2.100.200,00	100,00	4.700.000,00			

3		[KEGIATAN] 2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah(%)			9.497.154. 487,00	86,00	5.316.34 4.000,00	0,00	543863 892	0,00	1864192 695	86,00	1110563 878	0,0 0	1216088 203	86,00	4.734.70 8.668,00					
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.02.0 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(Orang/bulan)				36,00	5.316.34 4.000,00	36,0 0	543.863. 892,00	0,00	1.864.19 2.695,00	0,00	1.110.56 3.878,00	0,0 0	1.216.08 8.203,00	100,0 0	4.734.70 8.668,00					
3		[KEGIATAN] 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan(%)			334.098.34 7,00	90,00	142.221. 375,00	0,00	186969 80	0,00	3085905 0	75,00	3227200 0	15, 00	5750725 2	90,00	139.335. 282,00					
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.06.0 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Paket)				14,00	12.000.0 00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	8.290.00 0,00	1,0 0	2.388.00 0,00	100,0 0	10.678.0 00,00					
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.06.0 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan(Paket)				168,00	12.000.0 00,00	0,00	0,00	0,00	2.976.00 0,00	126,00	6.386.00 0,00	42, 00	2.604.00 0,00	100,0 0	11.966.0 00,00					
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.06.0 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan(Paket)				4,00	6.025.00 0,00	1,00	670.000, 00	0,00	2.444.80 0,00	2,00	0,00	1,0 0	2.732.60 0,00	100,0 0	5.847.40 0,00					
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.06.0 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan(Dokum en)				6,00	9.000.00 0,00	6,00	650.000, 00	0,00	3.350.00 0,00	0,00	1.340.00 0,00	0,0 0	2.680.00 0,00	100,0 0	8.020.00 0,00					

4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.06.0 7 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan(Paket)				4,00	33.721.375,00	1,00	0,00	0,00	17.333.250,00	2,00	0,00	1,00	16.239.650,00	100,00	33.572.900,00				
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.06.0 8 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu(Laporan)				12,00	7.000.000,00	3,00	0,00	0,00	720.000,00	6,00	3.266.000,00	3,00	2.974.500,00	100,00	6.960.500,00				
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.06.0 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)				119,00	62.475.000,00	27,00	17.376.980,00	0,00	4.035.000,00	60,00	12.990.000,00	32,00	27.888.502,00	100,00	62.290.482,00				
3		[KEGIATAN] 2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan(%)			237.662.602,00	90,00	127.199.882,00	0,00	14538048	0,00	39982133	60,00	18527582	30,00	35715444	90,00	108.763.207,00				
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.08.0 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(Laporan)				12,00	62.577.482,00	3,00	10.229.888,00	3,00	18.441.333,00	3,00	9.911.262,00	3,00	18.482.804,00	100,00	57.065.287,00				
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.08.0 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan(Laporan)				12,00	64.622.400,00	3,00	4.308.160,00	3,00	21.540.800,00	3,00	8.616.320,00	3,00	17.232.640,00	100,00	51.697.920,00				

3		[KEGIATAN] 2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik(%)			540.004.79 5,00	90,00	362.133. 951,00	0,00	108000 00	0,00	3290300 0	60,00	2519612 0	30, 00	2826392 00	90,00	351.538. 320,00				
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.09.0 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit)				182,00	105.000. 000,00	0,00	6.850.00 0,00	91,0 0	31.343.0 00,00	22,00	18.386.9 00,00	69, 00	41.627.5 00,00	100,0 0	98.207.4 00,00				
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.09.0 9 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi(Gedung)				3,00	237.133. 951,00	0,00	0,00	0,00	180.000, 00	0,00	4.084.22 0,00	3,0 0	230.621. 700,00	100,0 0	234.885. 920,00				
4		[SUB KEGIATAN] 2.14.01.2.09.1 0 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi(Unit)				21,00	20.000.0 00,00	4,00	3.950.00 0,00	0,00	1.380.00 0,00	12,00	2.725.00 0,00	5,0 0	10.390.0 00,00	100,0 0	18.445.0 00,00				
	[Target Capaian Sub Kegiatan]																100.0 0 %					



Analisis pencapaian kinerja pelayanan DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**

**(Tabel T-C. 30 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan  
Kabupaten Mojokerto**

NO	IINDIKATOR	SPM/ Standart Nasion al	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (n-2)	Tahun 2022(n -1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2022 (n-3)	Tahun 2023(n- 2)	Tahun 2024(n- 1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	-	-	-	APE Madya	APE Madya	APE Nindya	APE Madya	APE Nindya	APE Nindya	APE Nindya	APE Nindya	Berdasarkan 7 komponen kunci : 1. Komitmen (Perda PUG, Perbub PUG) 2. Kebijakan (RPJMD, Renstra OPD) 3. Pelembagaan (POKJA PUG, Focal Point) 4. Sumber Daya Manusia dan Anggaran (SDM terlatih PPRG dan Jumlah Anggaran APBD Kabupaten Responsif Gender) 5. Alat Analisis Gender (Gender Analisis Pathway (GAP), Gender Budgeting Statemen (GBS), Term Of Reference (TOR) 6. Data Gender (Data terpilah perempuan dan laki terkait berbagai hal dalam system informasi satu Data) 7. Partisipasi Masyarakat (PUSPA : Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak, anggotanya : Lembaga Masyarakat, Organisasi Profesi, Dunia Usaha dan Media)

2	Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA)	-	-	-	KLA Nindya	KLA Nindya	KLA Nindya	KLA Madya	KLA Madya	KLA Madya	KLA Madya	KLA Madya	Brdasarkan indicator KLA yang dituangkan dalam 5 klaster : 1. Hak sipil dan kebebasan 2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif DP2KBP2 Bidang Perlindungan Anak 3. Kesehatan dasar dan Kesejahteraan 4. Pendidikan, Pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya 5. Perlindungan Khusus
3	Prevalensi KB Aktif	-	-	80,52 %	80,56 %	80,23 %	80,30 %	80,73 %	80,30 %	80,06 %	80,30 %	80,06 %	Data di dapat berdasarkan jumlah PUS sebanyak 225.684 dan jumlah peserta KB aktif ( yang ikut IUD, MOW, MOP, Kondom, Implant, Suntuk dan Pil) sebanyak 180.682
4	Prosentase Keluarga yang Ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	72,94 %	72,96 %	71,11 %	72,50 %	71,11 %	72,00 %	73,30 %	72,00 %	73,30 %	Formulasi perhitungan : Jumlah Keluarga yang Ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga = 84.686 Orang dibanding Jumlah Sasaran Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga = 115.537 Orang di kali 100 %
5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	83,28 (A)	83,78 (A)	83,87 (A)	84,50(A)	83,87 (A)	84,42 (A)	84,55 (A)	84,42 (A)	84,55 (A)	Dinilai Berdasarkan Akuntabilitas Kinerja OPD
6	Indeks profesionalitas ASN	-	-	65,39	65,39	86,15	86,20	58,43	86,15	85,46	86,43	85,46	
7	Jumlah Inovasi yang terintegrasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	-	-	-	2 Inovasi	2 Inovasi	2 Inovasi	-	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	1 Inovasi	Rangkul Korek Pacare (Ruang Pengaduan dan Konsultasi Korban Kekerasan Pada Perempuan dan Anak Secara Online)

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Mojokerto, DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto dengan kriteria Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Untuk menganalisis tingkat keberhasilan dan kegagalan dapat dilihat sejauh mana strategi pencapaian sasaran berupa kebijakan yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program-program yang menjadi tolok ukur pada Standar Pelayanan Minimal bidang pelayanan terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, bidang Keluarga Berencana

### **Capaian Indikator Kinerja (Renstra DP2KBP2 2016-2021)**

Pengukuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Pengumpulan data kinerja dilakukan untuk memperoleh data kinerja yang akurat, lengkap dan tepat waktu sehingga bermanfaat bagi pengambilan keputusan dan perbaikan dengan tidak meninggalkan prinsip efisiensi, efektifitas dan penghematan biaya. Analisis tentang pencapaian kinerja secara keseluruhan dimaksudkan sebagai bahan laporan tentang keberhasilan ataupun kegagalan kepada atasan dan pihak – pihak yang berkepentingan.

Capaian kinerja yang dicapai di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto dilihat dari bagaimana Organisasi memiliki target tinggi yang ingin dicapai.

Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian kinerja organisasi pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024.

## PENCAPAIAN KINERJA

Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% capaian
1	2	3	4	5
1. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana	Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE)	APE Nindya	APE Nindya	100 %
	Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA)	KLA Nindya	KLA Madya	90 %
	Prevalensi KB Aktif	80,30 %	80,06 %	99,70 %
	Persentase Keluarga yang Ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	72,50 %	73,30%	101,10 %
2. Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,50 (A)	84,55 (A)	100,09 %
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	96,5 %	96,22 %	100,18 %
	Indeks Profesionalitas ASN	86,20 (Tinggi)	85,46 (Tinggi)	100,18 %
3. Optimalnya Kualitas Pelayanan Melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah	Jumlah Inovasi yang Terintegrasi dan Tersosialisasi Serta Berkelanjutan	1 Inovasi	1 Inovasi	100 %

Analisis capaian kinerja masing – masing sasaran pada Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 adalah senagai berikut :

Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Sasaran strategis 1 : “Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Serta Keluarga Berencana” dengan indikator :

1. Evaluasi Anugerah Ekapraya (APE), tahun 2024 terealisasi dengan Nilai APE Ninya dan tingkat capaian sebesar 100% dengan predikat **Sangat Berhasil**.

Perhitungan Evaluasi Anugerah Ekapraya (APE) dengan nilai APE Ninya diperoleh dari 3 komponen kunci :

a) **Pelembagaan PUG** terdiri dari :

- a. Regulasi/Kebijakan tentang Penyelenggaraan PUG, di buktikan dengan SK Fokal Point, **Perda Nomor 1 Tahun 2021** tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), **Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020** tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.
- b. Kebijakan, di buktikan dengan RPJMD, Renstra, Renja, KUA – PPAS, RKA Perangkat Daerah.
- c. Kelembagaan, telah terbentuk **UPTD PPA** dengan Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2023
- d. Kelompok Pokja PUG, **Tim driver PUG, Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG**
- e. **Sumber Daya Manusia** yang terlatih PUG (SDM Perencana, SDM Teknis, SDM Pemantau, Evaluasi dan Pelaporan, SDM APIP, SDM Bidang Hukum, SDM Aparat Penegak Hukum dan **Internalisasi PUG** serta Fasilitas yang memadai
- f. Sistem Data Terpilah Gender data diperoleh dari tiap Perangkat Daerah berupa **Satu Data Palapa** (Data Statistik yang terpilah dan Profil Gender)

b) **Penyelenggaraan PUG** terdiri dari :

- a. Perencanaan dibuktikan dengan dokumen ARG (penyusunan GAP, GBS, TOR) tiap Perangkat Daerah, adanya modul dan panduan untuk menyusun dokumen ARG, Dokumen ARG 25 % dari anggaran tahun n – 1
- b. Penganggaran PUG dibuktikan dengan issue Gender dalam penganggaran PUG dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial (Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim),

- c. Ekonomi dan Bidang Lainnya mulai pada RPJMD, Renstra, Renja, KUA – PPAS, RKA Perangkat Daerah.
- d. Pelaksanaan dibuktikan dengan Partisipasi Masyarakat, Dunia Usaha, Media dan Akademisi Jejaring sebagai kontrol, pengawas, mitra kerja pelayanan pelaksanaan PUG (Puspa, CSR, LSM, Akademisi) di libatkan dalam pelaksanaan Pengarus utamaan Gender serta ketersediaan sarana dan prasarana yang responsive Gender dan juga pelaksanaan (advokasi dan sosialisasi, bimtek, pembinaan, pendampingan, pengawasan dan Evaluasi) Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)
- e. Pemantauan, melibatkan seluruh Perangkat Daerah dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat yang Responsif Gender
- f. Evaluasi dilakukan oleh Kepala Daerah dalam bentuk Evaluasi Dokumen ARG Perangkat Daerah, Desk PPRG.
- g. Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Kab. Mojokerto berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLLHP) terhadap Dokumen Anggaran Responsif Gender.
- h. Pelaporan berupa Lakip, LKPJ, LPPD dan Laporan Pelaksanaan PUG yang disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur melalui DP3AK Prov. Jatim.

**c) Inovasi PUG meliputi:**

Berupa duplikasi/replikasi kearifan Lokal atau Modifikasi merupakan bentuk kebaruan (ide/gagasan baru) terintegrasi dengan layanan sistem lain, berkelanjutan, yang dicapai dengan cara kreatif, memiliki dampak dan direplikasi sebagai best practice. (Inovasi Kasat Mata, Inovasi labujari, Inovasi Darisasoo, Inovasi Mensasoo.

**APE MENURUT KATEGORI NILAI DARI TAHUN 2020 sd 2024:**

TAHUN	KATEGORI	NILAI	KETERANGAN
2020	MADYA	601 - 700	Monev
2021	MADYA	601 – 700	Tidak ada monev
2022	MADYA	601 – 700	Tidak ada monev
2023	NINDYA	701 – 800	Monev
2024	NINDYA	701 – 800	Tidak ada monev

*Sumber data : Bidang PPPUG*

Adapun monitoring dan evaluasi implementasi PUG yang di lakukan melalui pemberian penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) terdiri atas prasarat aspek organisasi :

1. Komitmen politik dan kepemimpinan kelembagaan;
2. Kebijakan responsif gender;
3. Kelembagaan;
4. Sumber daya manusia dan anggaran;

Sementara itu, prasarat aspek non organisasi meliputi :

5. Sistem informasi dan data terpilah/gender;
6. Alat analisis gender;
7. Partisipasi masyarakat.

Walaupun sudah memenuhi target kinerja, namun terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

- ✓ Terdapat perangkat daerah yang belum mengumpulkan dokumen ARG (Anggaran Responsif Gender);
- ✓ Terdapat perangkat daerah yang belum paham membuat dokumen ARG (Anggaran Responsif Gender); dan
- ✓ Pengumpulan data tidak tepat waktu; dan
- ✓ Belum optimalnya evaluasi kinerja perangkat daerah.

Rencana tindaklanjut :

- ✓ Dilakukan evaluasi kepada perangkat daerah pada Dokumen Anggaran Responsif Gender (ARG);
- ✓ Mengintensifkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait pengumpulan Dokumen Anggaran Responsif Gender (ARG);

2. Kabupaten Layak Anak (KLA), tahun 2024 terealisasi dengan Nilai APE Madya dan tingkat capaian sebesar 90% dengan predikat **Tinggi**.

Perhitungan Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan nilai KLA Madya diperoleh berdasarkan 5 klaster :

1. Hak Sipil dan Kebebasan, di buktikan dengan pembuatan akte seluruh anak di Kabupaten Mojokerto (dispenduk capil), Forum anak desa, kecamatan, kabupaten (DP2KBP2), Tersedianya pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A), Pengawasan penggunaan internet bagi anak (pengawasan tim cyber dari

2. Polres/kominfo), KIE bagi anak disabilitas (Dinsos), penyediaan KIA (dispenduk capil).
3. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, dibuktikan dengan pengasuhan alternatif (lingkungan keluarga dan yayasan untuk anak terlantar), Pemenuhan tumbuh kembang ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum), Pelatihan pola asuh anak, dukungan akreditasi LKSA (Lembaga Lkesejahteraan Sosial Anak) Villa durian do'a, Pendidikan pra nikah dilakukan Kemenak dan DP2KBP2.
4. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, adanya puskesmas ramah anak, ruang laktasi di semua fasilitas umum, fasilitasi sarpras posyandu, teredainya air bersih, ruang terbuka hijau, Perventif AKI dan Anak (Dinas Kesehatan)
5. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Ruang dan Kegiatan Budaya, di buktikan dengan wajib belajar 9 tahun, Pendidikan inklusi, Pusat kreatifitas anak, Sarpras ZOSS (Zona Selamat Sekolah), Mewujudkan Sekolah Ramah Anak (SK Sekolah Ramah Anak), Beasiswa, Memfasilitasi SKB, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah tanpa kekerasan
6. Perlindungan Khusus, adanya fasilitasi P2TP2A, program pencegahan tindak kekerasan yang di lakukan oleh DP2KBP2 dan Dinas Sosial, Perlindungan dan mitigasi bencana bagi anak (Dinsos dan BPBD), akses kartu penyandang disabilitas (dari dinsos).

**KLA MENURUT KATEGORI NILAI DARI TAHUN 2020 sd 2024 :**

TAHUN	KATEGORI	NILAI	KETERANGAN
2020	MADYA	601 - 700	Tidak ada Monev
2021	MADYA	601 - 700	Monev
2022	MADYA	601 - 700	Monev
2023	MADYA	601 - 700	Monev
2024	MADYA	601 - 700	Tidak ada monev

Sumber data : Bidang Perlindungan Anak

Adapun penilaian yang di lakukan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Layak Anak adalah pemenuhan 31 hak anak yang menjadi tanggung jawab bersama seluruh Perangkat daerah Terkait, misal :

1. Dispenduk capil berkaitan dengan hak sipil dan kebebasan diantaranya identitas anak;

2. Dinas Sosial dan DP2KBP2 berkaitan dengan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif (anak – anak terlantar);
3. Dinas Kesehatan berkaitan dengan Kesehatan dasar dan Kesejahteraan terkait pencegahan stunting, 1000 hari Pertama Kehidupan, tumbuh kembang anak dll;
4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Ruang dan Kegiatan Budaya berkaitan dengan Dinas Pendidikan;
5. Dinas Sosial dan BPBD berkaitan dengan Perlindungan khusus diantaranya anak disabilitas, Anak Berhadapan Dengan Hukum dan anak korban bencana alam.

Walaupun sudah kategori tinggi, namun terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

- ✓ Tidak ada penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA) di Tahun 2024 ;
- ✓ Penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA) di laksanakan Tahun 2025; dan
- ✓ Pengumpulan data tidak tepat waktu; dan
- ✓ Belum optimalnya evaluasi kinerja perangkat daerah.

Rencana tindaklanjut :

- ✓ Dilakukan evaluasi kepada perangkat daerah terkait data yang di perlukan;
- ✓ Mengintensifkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait pengumpulan data yang di perlukan.

3. Prevalensi KB Aktif, tahun 2024 terealisasi sebesar 80,06 % dan tingkat capaian sebesar 99,70% dengan predikat **Sangat Tinggi**. Perhitungan Prevalensi KB Aktif sebesar 80,06 % diperoleh dari :

$$\frac{\text{Jumlah Peserta Aktif (PA)}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)}} \times 100\%$$

**PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF  
DI KABUPATEN MOJOKERTO BULAN DESEMBER 2024**

NO	KECAMATAN	PPM	PUS	ALAT KONTRASEPSI							JUMLAH	% THDP PPM	MKJP	%MKJP	PREV.
		2024		IUD	MOW	MOP	KD	IMP	STK	PIL					
1	JATIREJO	4.232	7.233	782	616	2	165	649	2.947	762	5.923	139,96	2.049	34,59	81,89
2	GONDANG	5.050	10.137	1.734	735	30	8	1.951	2.796	956	8.210	162,57	4.450	54,20	80,99
3	PACET	6.924	13.343	2.066	653	12	14	2.241	4.528	1.277	10.791	155,85	4.972	46,08	80,87
4	TRAWAS	3.191	6.154	429	407	3	34	667	2.751	602	4.893	153,34	1.506	30,78	79,51
5	NGORO	9.451	17.074	1.528	1.121	11	363	1.352	6.545	2.868	13.788	145,89	4.012	29,10	80,75
6	PUNGGING	8.496	14.112	1.119	398	8	132	540	7.620	1.081	10.898	128,27	2.065	18,95	77,23
7	KUTOREJO	6.769	13.921	528	382	5	205	1.121	5.422	4.090	11.753	173,63	2.036	17,32	84,43
8	MOJOSARI	8.583	12.696	2.753	1.150	15	471	1.289	3.157	1.251	10.086	117,51	5.207	51,63	79,44
9	DLANGGU	6.657	12.491	1.590	1.063	48	64	1.576	4.712	1.015	10.068	151,24	4.277	42,48	80,60
10	BANGSAL	5.572	9.717	642	441	6	481	735	4.392	1.171	7.868	141,21	1.824	23,18	80,97
11	PURI	8.452	15.800	1.308	740	17	761	2.012	5.128	2.790	12.756	150,92	4.077	31,96	80,73
12	TROWULAN	8.691	12.717	600	580	11	89	744	5.324	1.583	8.931	102,76	1.935	21,67	70,23
13	SOOKO	8.362	14.806	1.981	846	4	378	900	6.445	1.321	11.875	142,01	3.731	31,42	80,20
14	GEDEG	8.551	16.670	1.953	926	22	638	1.781	5.777	2.424	13.581	158,09	4.682	34,64	81,09
15	KEMLAGI	6.358	11.703	1.021	910	60	242	1.383	5.024	849	9.489	149,25	3.374	35,56	81,08
16	JETIS	10.447	19.340	1.049	660	61	623	1.121	9.404	2.321	15.239	145,87	2.891	18,97	78,80
17	DAWARBLANDONG	5.296	8.880	347	361	8	113	829	4.717	1.110	7.485	141,33	1.545	20,64	84,29
18	MOJOANYAR	4.629	8.890	962	490	10	119	820	3.635	1.075	7.111	153,62	2.282	32,09	79,99
	KABUPATEN	125.711	225.684	22.392	12.479	333	4.897	21.711	90.324	28.546	180.682	143,73	56.915	31,50	80,06

Sumber Data : Aplikasi SIGA (Sistem Informasi Keluarga)

**Pencapaian Peserta KB Aktif per Mix Kontrasepsi sebagai berikut :**

No.	Jenis Kontrasepsi	Pencapaian Bulan Desember 2024
1	IUD	22.392
2	MOW	12.479
3	MOP	333
4	Kondom	4.897
5	Implant	21.711
6	Suntik	90.324
7	Pil	28.546
	TOTAL	180.682

Sumber Data : Aplikasi SIGA (Sistem Informasi Keluarga)

## Perbandingan Prevalensi KB Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 s/d 2024

No.	Tahun	Jumlah PUS	Jumlah Peserta KB Aktif	Prevalensi (%)
1.	2020	245.061	197.565	80,62
2.	2021	247.373	199.545	80,67
3.	2021	227.174	183.388	80,73
4.	2023	230.204	184.695	80,23
5.	2024	225.684	180.682	80,06

Sumber Data : Aplikasi SIGA (Sistem Informasi Keluarga)

Dari data diatas, maka prevalensi per tahun stabil 80 %. Hal ini diharapkan dalam kurun waktu tersebut mampu menurunkan angka TFR dari Kabupaten Mojokerto. Dengan melihat indikasi kestabilan prevalensi tersebut maka KIE dan pembinaan kepada akseptor perlu ditingkatkan agar angka DO dapat ditekan dan melestarikan akseptor KB.

Walaupun sudah kategori sangat tinggi, namun terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

- ✓ Menurunnya unmet need (pasangan usia subur yang tidak ingin punya anak lagi atau yang ingin menjarangkan kelahiran, tetapi tidak menggunakan kontrasepsi) Tahun 2024 ;
- ✓ Kurang nya Kepesertaan KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang;
- ✓ Kurangkanya kepesertaak KB Aktif;
- ✓ Pengumpulan data tidak tepat waktu; dan
- ✓ Belum optimalnya evaluasi kinerja kepada penyuluh KB serta kader PPKBD dan Sub PPKBD.

Rencana tindaklanjut :

- ✓ Dilakukan Sosialisasi KB dengan sasaran Pasangan Usia Subur;
- ✓ Dilakukan pelayanan KB Kepada PUS anmet need dan sosialisasi KB MKJP;
- ✓ Dilakukan pelatihan SDM bagi kader PPKBD dan Sub PPKBD;
- ✓ Dilakukan pelatihan SDM bagi petugas medis; dan
- ✓ Pendistribusian alokon ke faskes – faskes tepat waktu.

4. Persentase Keluarga yang Ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terealisasi sebesar 73,30 % dan tingkat capaian sebesar 101,10 % dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Perhitungan Persentase Keluarga yang Ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebesar 73,30 % di peroleh dari :

$$\frac{\text{Jumlah Keluarga yang ikut kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga}}{\text{Jumlah sasaran kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga}} \times 100\%$$

**PROSENTASE KELOMPOK KETAHANAN KELUARGA DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA YANG AKTIF DI KABUPATEN MOJOKERTO**

No	KECAMATAN	JUMLAH SASARAN					REKAP JUMLAH SASARAN	JUMLAH YANG IKUT KEGIATAN					REKAP JUMLAH YANG IKUT KEGIATAN	PROSENTASE
		BKB	BKR	BKL	PIK R	UPPKA		BKB	BKR	BKL	PIK R	UPPKA		
	JATIREJO	3.342	329	539	125	20	4.355	2.562	236	437	234	20	3.489	80,11
	GONDANG	3.176	417	396	275	20	4.284	2.430	385	344	50	20	3.229	75,37
	PACET	4.442	5.884	487	125	34	10.972	3.389	4.698	473	161	34	8.755	79,79
	TRAWAS	1.935	282	159	150	37	2.563	1.500	125	79	110	34	1.848	72,10
	NGORO	6.074	6.338	178	125	10	12.725	4.676	4.322	164	105	10	9.277	72,90
	PUNGGING	4.928	1.852	1.073	125	55	8.033	3.780	520	491	39	51	4.881	60,76
	KUTOREJO	4.511	2.441	821	125	55	7.953	3.478	843	573	91	52	5.037	63,33
	MOJOSARI	4.237	1.322	1.121	150	25	6.855	3.257	779	561	91	23	4.711	68,72
	DLANGGU	4.035	1.521	570	100	40	6.266	3.097	1.009	413	152	40	4.711	75,18
	BANGSAL	3.339	318	370	150	21	4.198	2.535	247	267	120	21	3.190	75,99
	PURI	5.165	667	540	150	17	6.539	3.956	535	456	75	17	5.039	77,06
	TROWULAN	5.098	651	570	325	14	6.658	3.911	422	543	260	14	5.150	77,35
	SOOKO	5.225	370	615	125	22	6.357	3.983	322	509	104	19	4.937	77,66
	GEDEG	3.492	2.431	1.019	150	89	7.181	2.700	534	513	69	77	3.893	54,21
	KEMLAGI	4.171	108	152	150	21	4.602	3.199	91	110	69	21	3.490	75,84
	JETIS	5.209	129	67	100	19	5.524	4.026	126	55	80	14	4.301	77,86
	DAWARBLANDON G	3.353	646	807	500	385	5.691	2.573	585	791	700	380	5.029	88,37
	MOJOANYAR	3.721	395	435	175	55	4.781	2.855	324	361	130	49	3.719	77,79
	<b>JUMLAH</b>	<b>75.453</b>	<b>26.101</b>	<b>9.919</b>	<b>3.125</b>	<b>939</b>	<b>115.537</b>	<b>57.906</b>	<b>16.103</b>	<b>7.140</b>	<b>2.640</b>	<b>896</b>	<b>84.686</b>	<b>73,30</b>

Sumber Data : Aplikasi SIGA (Sistem Informasi Keluarga)

Jumlah keluarga yang ikut kelompok ketahanan dan kesejahteraan Keluarga di kabupaten Mojokerto sebesar 84.686 Keluarga dapat dilihat dari data sebagai berikut :

No.	Kelompok	Jumlah Keluarga yang ikut kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Sasaran
1.	BKB	57.906	75.453
2.	BKR	16.103	26.101
3.	BKL	17.085	9.919
4.	PIK - R	2.625	3.125
5.	UPPKA	608	939
<b>JUMLAH</b>		<b>81.353</b>	<b>115.537</b>

*Sumber Data : Aplikasi SIGA (Sistem Informasi Keluarga)*

Walaupun sudah kategori sangat tinggi, namun terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

- ✓ Kurangnya kepesertaan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL UPPKA) Tahun 2024; dan
- ✓ Pengumpulan data tidak tepat waktu.

Rencana tindak lanjut :

- ✓ Dilakukan Sosialisasi pembentukan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL UPPKA);
- ✓ Dilakukan pelatihan SDM bagi kader BKB, BKR, BKL, UPPKA;

b. Sasaran strategis 2 : “Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel” dengan indikator :

1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah, dengan Nilai 84,55 (A) dan tingkat capaian sebesar 100,09% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Nilai Evaluasi SAKIP DP2KBP2 yang dikeluarkan oleh Inpektorat

**NILAI SAKIP DP2KBP2 DARI TAHUN 2021 sd 2024**

<b>TAHUN</b>	<b>NILAI</b>	<b>KETERANGAN</b>
2021	83,19 (A)	Dari hasil evaluasi inspektorat 1. Komponen Perencanaan Kinerja 27,74 2. Pengukuran kinerja 20,00 3. Pelaporan Kinerja 12,58 4. Evaluasi Internal 16,81 5. Pencapaian Sasaran/kinerja 16,81
2022	83,87 (A)	Dari hasil evaluasi inspektorat 1. Komponen Perencanaan Kinerja 28,98 2. Pengukuran kinerja 25,99 3. Pelaporan Kinerja 12,05, 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 16,85
2023	84,42 (A)	Dari hasil evaluasi inspektorat 1. Komponen Perencanaan Kinerja 25,88 2. Pengukuran kinerja 25,35 3. Pelaporan Kinerja 12,44, 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 20,71
2024	84,55 (A)	Dari hasil evaluasi inspektorat 1. Komponen Perencanaan Kinerja 25,50, 2. Pengukuran kinerja 26,10 3. Pelaporan Kinerja 12,45, 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 20,50

*Sumber data : Perencana/Inspektorat*

2. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah, sebesar 96,22 % dan tingkat capaian sebesar 100,18 % dengan predikat **Sangat Tinggi**.  
 Perhitungan Presentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah sebesar 96,22 % di lihat dari :

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi Anggaran Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah Anggaran Perangkat Daerah}} \times 100\%$$

**NILAI PROSENTASE RLA DP2KBP2 DARI TAHUN 2021 sd 2024**

<b>TAHUN</b>	<b>Prosentase (%)</b>	<b>KETERANGAN</b>
2021	78,59	Anggaran sebelum Perubahan APBD : Rp. 18.704.695.874,00 Anggaran Setelah Perubahan PAPBD : <u>Rp. 18.136.274.266,00</u> Realisasi : Rp. 14.252.444.199,00  Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran : Rp. 3.883.830.029,00
2022	84,67	Anggaran sebelum Perubahan APBD : Rp. 18.760.987.400,00 Anggaran Setelah Perubahan PAPBD : <u>Rp. 20.080.700.356,00</u> Realisasi : Rp. 17.001.692.415,00  Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran : Rp. 3.079.007.941,00
2023	95,83	Anggaran sebelum Perubahan APBD : Rp. 20.282.709.400,00 Anggaran Setelah Perubahan PAPBD : <u>Rp. 20.975.893.333,00</u> Realisasi : Rp. 19.949.298.363,00 Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran : Rp. 1.026.594.970,00
2024	96,22	Anggaran sebelum Perubahan APBD : Rp. 20.140.239.912,00 Anggaran Setelah Perubahan PAPBD : <u>Rp. 20.431.065.412,00</u> Realisasi : Rp. 19.657.817.756,00  Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran : Rp. 773.247.656,00

*Sumber data : Bagian Keuangan*

**PROYEKSI REALISASI ANGGARAN SAMPAI DENGAN DESEMBER 2024**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

NO	KODE SUB KEG	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	JUMLAH REALISASI SD DESEMBER	SISA S/D AKHIR DES	%
1.	2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	22.278.800,00	21.525.942,00	752.858,00	96,62%
2.	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000,00	17.823.900,00	2.176.100,00	89,12%
3.	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	81.721.200,00	80.030.080,00	1.691.120,00	97,93%
4.	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	45.575.000,00	43.965.000,00	1.610.000,00	96,47%
5.	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/kegiatan pencegahan KTA	97.880.137,00	95.687.980,00	2.192.157,00	97,76%
6.	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	242.400.000,00	242.400.000,00	0,00	100%
7.	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1.207.600.000,00	1.206.883.828,00	716.172,00	99,94%
8.	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	140.000.000,00	111.170.000,00	28.830.000,00	79,41%
9.	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	892.800.000,00	859.759.000,00	33.041.000,00	96,30%
10.	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	270.000.000,00	269.096.000,00	904.000,00	99,67%

NO.	KODE SUB KEG	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	JUMLAH REALISASI SD DESEMBER	SISA S/D AKHIR DES	%
11.	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	100.000.000,00	96.551.000,00	3.449.000	96,55%
12.	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	250.000.000,00	222.005.000,00	27.995.000,00	88,80%
13.	2.14.03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	43.200.000,00	40.555.892,00	2.644.108,00	93,88%
14.	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	912.000.000,00	912.000.000,00	0,00	100%
15.	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	1.241.400.000,00	1.237.200.332,00	4.199.668,00	99,66%
16.	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana PKB/PLKB)	1.261.968.000,00	1.243.920.000,00	18.048.000,00	98,57%
17.	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	45.000.000,00	25.650.000,00	19.350.000,00	57,00%
18.	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.437.050.000,00	1.432.931.600,00	4.118.400,00	99,71 %
19.	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	22.500.000,00	22.380.000,00	120.000,00	99,47%
20.	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	3.750.000,00	3.711.000,00	39.000,00	98,96 %
21.	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	599.000.000,00	577.285.000,00	21.715.000,00	96,37 %
22.	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	48.000.000,00	41.020.000,00	6.980.000,00	85,46 %

NO.	KODE SUB KEG	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	JUMLAH REALISASI SD DESEMBER	SISA S/D AKHIR DES	%
23.	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	300.000.000,00	297.920.000,00	2.080.000,00	99,31 %
24.	2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	62.460.750,00	58.272.724,00	4.188.026,00	93,29%
25.	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	2.586.000.000,00	2.586.000.000,00	0,00	100 %
26.	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	2.844.600.000,00	2.844.600.000,00	0,00	100 %
27.	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.000.000,00	6.999.700,00	300,00	100 %
28.	2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.200.000,00	4.199.900,00	100,00	100 %
29.	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.267.940.000,00	4.725.869.627,00	542.070.373,00	89,71 %
30.	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.599.400,00	8.599.000,00	400,00	100 %
31.	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.000.000,00	11.760.000,00	240.000,00	98,00 %
32.	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.761.100,00	14.405.500,00	355.600,00	97,59 %
33.	2.14.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.180.800,00	7.148.000,00	32.800,00	99,54%
34.	2.14.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	33.721.375,00	27.839.800,00	5.881.575,00	82,56%

NO	KODE SUB KEG	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	JUMLAH REALISASI SD DESEMBER	SISA S/D AKHIR DES	%
35.	2.14.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.000.000,00	6.986.500,00	13.500,00	99,81%
36.	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000,00	49.779.652,00	220.348,00	99,56%
37.	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.000.450,00	53.746.983,00	21.253.467,00	71,66%
38.	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	53.852.000,00	51.697.920,00	2.154.080,00	96,00%
39.	2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	87.636.400,00	74.099.200,00	13.537.200,00	84,55%
40.	2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.990.000,00	4.555.700,00	434.300,00	91,30%
41.	2.14.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00	19.785.996,00	214.004,00	98,93%
<b>JUMLAH</b>			<b>20.431.065.412,00</b>	<b>19.657.817.756,00</b>	<b>773.247.656,00</b>	<b>96,22%</b>

Sumber Data : aplikasi e monev/ bagian keuangan

Persentasi realisasi anggaran perangkat daerah di dapat melalui aplikasi si monev yang di evaluasi

setiap bulan

Anggaran sebelum Perubahan APBD : Rp. 20.140.239.912,00

Anggaran Setelah Perubahan PAPBD : Rp. 20.431.065.412,00

Realisasi : Rp. 19.657.817.756,00

Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran : Rp. 773.247.656,00

3. Indeks Profesionalitas ASN, dengan Nilai 85,46 (Tinggi) dan tingkat capaian sebesar 99,14 % dengan predikat **Sangat Tinggi**.

Indeks profesionalitas ASN didapat dari kualitas ASN Berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan disiplin pegawai asn dalam melakukan tugas jabantannya.

**NILAI IP ASN DP2KBP2 DARI TAHUN 2021 sd 2024 :**

TAHUN	NILAI
2021	72,27 (Sedang)
2022	86,15 (Tinggi)
2023	86,15 (Tinggi)
2024	85,46 (Tinggi)

*Sumber Data : Bagian Umum dan Kepegawaian*

- c. Sasaran strategis 3 : “Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah” dengan Indikator, Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan dengan 1 inovasi dan tingkat capaian sebesar 100 % dengan predikat **Sangat Tinggi**.

- ✓ DP2KBP2 mempunyai inovasi berupa layanan online dengan nama RANGKUL KOREK PACARE (Ruang Pengaduan dan Konsultasi Korban Kekerasan pada Perempuan dan Anak secara online) Versi 2, pengaduan online selama 24 jam melalui hotline dengan nomor telpon 085860470510 serta link pengaduan <https://bit.ly/FormRANGKULKabMjk>.
- ✓ Dalam keadaan emergency korban bisa melapor secara cepat dan bisa dilayani dengan cepat sesuai keinginan korban. Tanpa harus datang ke sekretariat P2TP2A terlebih dahulu.

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Disadari sepenuhnya dalam era otonomi daerah, walaupun tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan secara umum telah dilaksanakan sepenuhnya namun dalam tahun 2024 hal-hal yang masih memerlukan perhatian secara khusus antara lain :

1. Salah satu dampak dari era otonomi adalah terjadinya mutasi personil baik keluar maupun kedalam struktur kelembagaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, terutama petugas lapangan KKBPK (Koordinator dan Penyuluh KKBPK) dan tenaga atau pejabat baru yang memerlukan pelatihan / orientasi program KKBPK dan Pemberdayaan Perempuan.
2. Perlu dilakukan pemantapan kerjasama dan kemitraan dengan instansi terkait, organisasi profesi, pihak swasta, LSOM serta mitra lainnya untuk mendukung pengelolaan dan pelaksanaan program KKBPK dan Pemberdayaan Perempuan.
3. Perlu dikembangkan model pendekatan pelayanan program KB / KR dan program pemberdayaan perempuan dan keluarga yang lebih efektif, terutama pelayanan bagi keluarga miskin dan penduduk rentan lainnya
4. Keberadaan Kampung KB yang relatif masih baru memerlukan perhatian khusus agar keberadaannya dapat memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya dalam memberikan informasi dan edukasi tentang Program KKBPK.
5. Maraknya pergaulan bebas, kehamilan diluar nikah dan kenakalan remaja akhir-akhir ini menjadi tantangan bagi KKBPK dan Pemberdayaan Perempuan yang cukup berat untuk diselesaikan. Untuk itu dukungan dari semua pihak sangat-sangat diharapkan untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Semua ini memerlukan dukungan dan peran aktif semua elemen terkait serta partisipasi masyarakat.

Adapun faktor penghambat pencapaian kinerja DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto berdasarkan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

#### a) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Belum semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merencanakan program/kegiatan pembangunan berorientasi pada data basis kependudukan.
2. Belum semua Pasangan Usia Subur (PUS) memahami masalah kesehatan reproduksi, utamanya akibat dari kehamilan atau melahirkan yang terlalu muda, terlalu tua, terlalu rapat dan terlalu banyak (4-T), sehingga dapat berdampak kurang baik terhadap kesehatan Ibu dan anak yang dilahirkan.
3. Peran dan fungsi Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD kurang maksimal dalam membantu pelaksanaan program di tingkat desa

atau dusun, karena sering terjadinya pergantian petugas PPKBD dan Sub PPKBD dan banyak yang merangkap menjadi kader lain, sehingga berpengaruh pada tingkat kemampuan dan pemahaman serta kinerja terhadap program.

4. Belum semua kader BKR dan PIK R memahami tentang program Genre terutama triad KRR (pernikahan dini, seks pra nikah, napza) sehingga berdampak pada kesehatan reproduksi remaja.
5. Pemahaman keluarga tentang pendidikan balita serta kesejahteraan dan kesehatan lansia masih kurang sehingga kegiatan BKB dan BKL kurang optimal.
6. Jumlah petugas lapangan KB sangat kurang untuk mendukung operasional pelaksanaan program di lapangan, sehingga sangat mempengaruhi hasil capaian kinerja program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

#### **b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

1. Sekretariat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) masih menjadi satu dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2)
2. Shelter atau titipan sementara belum berfungsi secara optimal
3. Masih kurangnya pelatihan peningkatan kapasitas dalam bidang Konvensi Hak Anak (KHA) dan Perlindungan Perempuan
4. Masih banyak P2TP2A tingkat kecamatan yang tidak berfungsi dan tidak melaporkan kejadian yang ada
5. Masih banyak Gugus Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Desa yang belum berfungsi secara optimal.
6. Masih kurangnya pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) kepada mitra kerja.
7. Belum adanya data terpilah tentang gender.

Sedangkan Isu – Isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode Focussed Group Discussion (FGD). Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesetaraan gender dalam masyarakat.
2. Meningkatnya perlindungan anak dari pelecehan seksual dan tindak kekerasan.
3. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan.
4. Bertambahnya kualitas perempuan dalam bidang Pendidikan, kesehatan dan Ekonomi.
5. Bertambahnya usia perkawinan ideal.

6. Berambahnya kesadaran masyarakat untuk ikut KB.
7. Bertambahnya jumlah keluarga yang menjadi kelompok tribina (BKB, BKR, BKL).
8. Bertambahnya kesejahteraan keluarga.
9. Bertambahnya kualitas media dan advokasi dan KIE KB.
10. Bertambahnya kualitas data yang cepat dan akurat.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto pada TA. 2025 adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.3**  
**(Tabel T-C. 31 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun Anggaran 2025**  
**Kabupaten Mojokerto**

**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>	DP2KBP2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,28 (A)	5.553.435.525	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>	DP2KBP2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,28 (A)	5.715.391.875	
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DP2KBP2	Prosentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai Target	90%	11.200.000	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DP2KBP2	Prosentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai Target	90%	11.200.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DP2KBP2	Prosentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	89%	5.097.494.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DP2KBP2	Prosentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	89%	5.097.494.000	

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DP2KBP2	IP ASN Perangkat Daerah	65,57%	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DP2KBP2	IP ASN Perangkat Daerah	65,57%	-	
	Administrasi Umum Perangkat daerah	DP2KBP2	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 %	203.263.125	Administrasi Umum Perangkat daerah	DP2KBP2	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90 %	309.706.775	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DP2KBP2	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	90%	128.852.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DP2KBP2	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	90%	128.852.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DP2KBP2	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	90%	112.626.400	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DP2KBP2	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	90%	168.139.100	
<b>2</b>	<b>Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</b>	<b>DP2KBP2</b>	<b>Prosentase kelembagaan daerah yang responsif gender</b>	<b>85,71%</b>	<b>187.939.000</b>	<b>Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</b>	<b>DP2KBP2</b>	<b>Prosentase kelembagaan daerah yang responsif gender</b>	<b>85,71%</b>	<b>187.939.000</b>	
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah OPD yang melaksanakan anggaran responsif gender	86 OPD	24.900.000	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah OPD yang melaksanakan anggaran responsif gender	86 OPD	24.900.000	
	Pembedayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial,	DP2KBP2	Jumlah PEKKA dan Perempuan Korban Kekerasan yang	40 Orang	112.743.000	Pembedayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial,	DP2KBP2	Jumlah PEKKA dan Perempuan Korban Kekerasan yang	40 Orang	112.743.000	

	dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		dilatih Berwirausaha			dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		dilatih Berwirausaha			
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah organisasi wanita dan lembaga penyedia layanan yang mendapat pembinaan	90 orang	49.750.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah organisasi wanita dan lembaga penyedia layanan yang mendapat pembinaan	90 orang	49.750.000	
3	<b>Program Perlindungan Perempuan</b>	<b>DP2KBP2</b>	<b>Prosentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan</b>	<b>100%</b>	<b>98.000.000</b>	<b>Program Perlindungan Perempuan</b>	<b>DP2KBP2</b>	<b>Prosentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan</b>	<b>100%</b>	<b>98.000.000</b>	
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah lintas sektor yang berperan aktif dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan atau TPPO	65 orang	50.000.000	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah lintas sektor yang berperan aktif dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan atau TPPO	65 orang	50.000.000	
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan	DP2KBP2	Jumlah Mitra Kerja / Jejaring yang Dapat Bersinergi dengan P2TP2A	15 Mitra Kerja / Jejaring	48.000.000	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi	DP2KBP2	Jumlah Mitra Kerja / Jejaring yang Dapat Bersinergi dengan P2TP2A	15 Mitra Kerja / Jejaring	48.000.000	

	Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota					Kewenangan Kabupaten/Kota					
4	<b>Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak</b>	DP2KBP2	<b>Prosentase OPD yang memiliki data terpilah gender dan anak</b>	97,92%	26.000.000	<b>Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak</b>	DP2KBP2	<b>Prosentase OPD yang memiliki data terpilah gender dan anak</b>	97,92%	26.000.000	
	Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyaji Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah profil gender dan anak yang disusun	1 buku	26.000.000	Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyaji Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah profil gender dan anak yang disusun	1 buku	26.000.000	
5	<b>Program Pemenuhan Hak Anak</b>	DP2KBP2	<b>Prosentase kecamatan layak anak</b>	50%	18.000.000	<b>Program Pemenuhan Hak Anak</b>	DP2KBP2	<b>Prosentase kecamatan layak anak</b>	50%	55.980.000	
			<b>Prosentase desa kelurahan layak anak</b>	14,47%				<b>Prosentase desa kelurahan layak anak</b>	14,47%		
	Pelembagaan PHA dan Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah kecamatan dan desa yang memahami PHA	136 Orang	18.000.000	Pelembagaan PHA dan Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah kecamatan dan desa yang memahami PHA	136 Orang	55.980.000	
6	<b>Program Perlindungan Khusus Anak</b>	DP2KBP2	<b>Prosentase korban anak dan ABH (anak</b>	100%	75.000.000	<b>Program Pemenuhan Hak Anak</b>	DP2KBP2	<b>Prosentase korban anak dan ABH (anak</b>	100%	85.000.000	

			<b>yang berhadapan dengan hukum) yang mendapatkan layanan</b>					<b>yang berhadapan dengan hukum) yang mendapatkan layanan</b>			
	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah lintas sektor dan remaja yang berperan aktif dalam pencegahan terhadap anak atau TPPO	30 orang	8.500.000	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah lintas sektor dan remaja yang berperan aktif dalam pencegahan terhadap anak atau TPPO	30 orang	8.500.000	
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah Jejaring dan petugas yang bersinergi dengan P2TP2A dan anak korban kekerasan yang mendapat pelayanan	125 Orang	18.500.000	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah Jejaring dan petugas yang bersinergi dengan P2TP2A dan anak korban kekerasan yang mendapat pelayanan	125 Orang	28.500.000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah Kepala Desa yang Memahami Desa Layak Anak	108 orang	48.000.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah Kepala Desa yang Memahami Desa Layak Anak	108 orang	48.000.000	
7	<b>Program Pengendalian Penduduk</b>	<b>DP2KBP2</b>	<b>Prosentase Data Program Bangsa</b>	<b>100 %</b>	<b>1.580.400.000</b>	<b>Program Pengendalian Penduduk</b>	<b>DP2KBP2</b>	<b>Prosentase Data Program Bangsa</b>	<b>100 %</b>	<b>1.580.400.000</b>	

			<b>Kencana dan Data Keluarga yang dilaporkan</b>					<b>Kencana dan Data Keluarga yang dilaporkan</b>			
	Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	DP2KBP2	Jumlah Petugas KKBPK dan Lintas Sektor yang Melaksanakan Koordinasi Program KKBPK	100 Org	80.000.000	Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	DP2KBP2	Jumlah Petugas KKBPK dan Lintas Sektor yang Melaksanakan Koordinasi Program KKBPK	100 Org	80.000.000	
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah perkiraan pengendalian penduduk tahun 2021 yang di petakan	1.169.760 Jiwa	1.500.400.000	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah perkiraan pengendalian penduduk tahun 2021 yang di petakan	1.169.760 Jiwa	1.500.400.000	
8	<b>Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</b>	DP2KBP2	<b>Prosentase PUS yang mendapat pelayanan Keluarga Berencana</b>	<b>80,58%</b>	<b>6.198.500.000</b>	<b>Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</b>	DP2KBP2	<b>Prosentase PUS yang mendapat pelayanan Keluarga Berencana</b>	<b>80,58%</b>	<b>6.693.500.000</b>	
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	DP2KBP2	Jumlah media komunikasi program KKBPK	50 media komunikasi	1.626.000.000	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	DP2KBP2	Jumlah media komunikasi program KKBPK	50 media komunikasi	1.626.000.000	

	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	DP2KBP2	Jumlah PLKB yang Mendapat Pembinaan Program KKBPK	60 Org	2.010.850.000	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	DP2KBP2	Jumlah PLKB yang Mendapat Pembinaan Program KKBPK	60 Org	2.505.850.000	
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi yang terdistribusikan serta pelaksanaan pelayanan KB di Kabupaten Mojokerto yang terlayani sesuai SOP	26.929 alkon	2.024.050.000	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi yang terdistribusikan serta pelaksanaan pelayanan KB di Kabupaten Mojokerto yang terlayani sesuai SOP	26.929 alkon	2.024.050.000	
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	DP2KBP2	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang Mensosialisasikan Program KKBPK	1.828 PPKBD dan Sub PPKBD	537.600.000	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	DP2KBP2	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang Mensosialisasikan Program KKBPK	1.828 PPKBD dan Sub PPKBD	537.600.000	
9	<b>Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</b>	<b>DP2KBP2</b>	<b>Prosentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif</b>	<b>97,91%</b>	<b>5.879.200.000</b>	<b>Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</b>	<b>DP2KBP2</b>	<b>Prosentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif</b>	<b>97,91%</b>	<b>5.879.200.000</b>	

	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	DP2KBP2	Jumlah Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R yang Mendapat Pembinaan	934 Kelompok	190.000.000	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	DP2KBP2	Jumlah Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R yang Mendapat Pembinaan	934 Kelompok	190.000.000	
	Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	DP2KBP2	Jumlah Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R yang Mendapat Pembinaan	934 Kelompok	5.689.200.000	Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	DP2KBP2	Jumlah Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R yang Mendapat Pembinaan	934 Kelompok	5.689.200.000	
<b>JUMLAH</b>					19.615.928.525					20.320.864.875	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam mensukseskan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga berencana (Bangga Kencana) di wilayah Kabupaten Mojokerto terdapat 2 (dua) pemangku kepentingan yang saling mendukung, yaitu Pemerintah dan masyarakat. Sehingga setiap pemangku kepentingan dapat mengusulkan program dan kegiatan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Mojokerto setiap tahunnya. Berikut ini usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan masyarakat dan dunia usaha yang masuk dalam Musrenbang Kabupaten Mojokerto TA. 2025 :

**Tabel 2.4**  
**(Tabel T-C. 32 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan TA. 2025**  
**Kabupaten Mojokerto**

No.	Program/Keg./Sub Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</b>		<b>Prosentase PUS yang mendapat pelayanan Keluarga Berencana</b>		
	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		Jumlah media komunikasi program KKBP		
	Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	DP2KBP2	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	Melakukan Sosialisasi KB
	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Jumlah PLKB yang Mendapat Pembinaan Program KKBP		
	Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB		Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	2 Organisasi	
2.	<b>Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</b>		<b>Prosentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif</b>		

	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R yang Mendapat Pembinaan		
	Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK - R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	DP2KBP2	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20 Kader	Melakukan Edukasi dan Sosialisasi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
	Sub Kegiatan Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga	DP2KBP2	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya Bangsa Kencana (Indeks Pembangunan Keluarga)	1 Dokumen	REMBUK STUNTING
3.	<b>Program Peningkatan Kualitas Keluarga</b>		<b>Prosentase kepala desa yang mendapatkan pemahaman tentang kebijakan pelaksanaan PUG di desa</b>		
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kepala Desa yang memahami kebijakan pelaksanaan PUG tingkat Desa		
	Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Pembinaan (Sosialisasi, Bimtek dan Pelatihan) Tentang Hak Perempuan dan Anak
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Organisasi	SEKOPER (Sekolah Perempuan dan Sekolah Ayah)
	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Pelatihan Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital
4.	<b>Program Pengarusutamaan Gender dan</b>		<b>Prosentase kelembagaan daerah yang responsif gender</b>		

	<b>Pemberdayaan Perempuan</b>				
	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah PEKKA dan perempuan korban Kekerasan yang dilatih berwiraswasta		
	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	DP2KBP2	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Organisasi	Musrenbang Perempuan Tingkat Pedesaan
	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah OPD yang melaksanakan anggaran responsif gender		
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	DP2KBP2	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Pelaksanaan DR PPA (Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak)
5.	<b>Program Perlindungan Khusus Anak</b>		<b>Prosentase korban anak dan ABH (anak yang berhadapan dengan hukum) yang mendapatkan layanan</b>		
	Kegiatan Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Jejaring dan petugas yang bersinergi dengan P2TP2A dan anak korban kekerasan yang mendapat pelayanan		
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	DP2KBP2	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	10 Layanan	Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Anak dan Sosialisasi Dispensasi Nikah

Pada Musrenbang Kabupaten Mojokerto TA. 2025 ada usulan program dan kegiatan Di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dari masyarakat.

## BAB III

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto pada TA. 2025 sesuai dengan aplikasi SIMREDA Kabupaten Mojokerto (usulan prioritas dan cadangan) dengan pagu sementara yang telah ditetapkan oleh BAPPEDA Kabupaten Mojokerto sebesar

**Rp. 20.320.864.875,00** (Dua puluh milyar tiga ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) adalah sebagaimana table berikut :

**Tabel 4.1**  
**Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah P-APBD Tahun Anggaran 2025**  
**Dengan Pagu Sementara Sebagaimana Pada Aplikasi SIPD**  
**Kabupaten Mojokerto**

NO	KODE						PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN SESUAI PAGU INDIKATIF	REALISASI s/d SAAT INI	RINCIAN PENGGUNAAN	SUMBER DANA	LOKASI	ANGGARAN SESUAI KEBUTUHAN	TAMBAH (KURANG)	RINCIAN PENGGUNAAN	TARGET	SUMBER DANA	KET
	2	1	1																	
1	2	1	1				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,50%	5.553.435.525				5.715.391.875	161.956.350			85,28%		
								Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi	1 Inovasi									1 Inovasi		
	2	1	0	2	0	0	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai Target	90%	11.200.000				11.200.000	-			90%		
	2	1	0	2	0	0	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	7.000.000		APBD	DP2KB P2	7.000.000	-			2 Dokumen	APBD	
							<b>RINCIAN :</b>													
							Photo Copy Spesifikasi : A3			500.000				500.000	-					
							Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota Spesifikasi : Full Day /Half Day			6.500.000				6.500.000	-					

2	1	0	2	0	0	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	4.200.000			APBD	DP2KB P2	4.200.000	-		1 Laporan	APBD	
						<b>RINCIAN :</b>													
						Photo Copy Spesifikasi : A3			500.000					500.000	-				
						Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			3.700.000					3.700.000	-				
2	1	0	2	0		<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah</b>	<b>89%</b>	<b>5.097.494.0 00</b>					<b>5.097.494.0 00</b>	-		<b>89%</b>		
2	1	0	2	0	0	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 orang	5.097.494.00			APBD	DP2KB P2	5.097.494.00	-		34 orang	APBD	
						<b>RINCIAN :</b>			5.097.494.00										
						Belanja Gaji Pokok PNS			1.980.504.00					1.980.504.00	-				
						Belanja Gaji Pokok PPPK			32.036.000					32.036.000	-				
						Belanja Tunjangan Keluarga PNS			192.316.000					192.316.000	-				
						Belanja Tunjangan Keluarga PPPK			4.486.000					4.486.000	-				
						Belanja Tunjangan Jabatan PNS			126.488.000					126.488.000	-				
						Belanja Tunjangan Fungsional PNS			186.164.000					186.164.000	-				
						Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS			37.582.000					37.582.000	-				
						Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK			1.850.000					1.850.000	-				





	2	1	0	2	0		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90%	203.263.125				309.706.775	106.443.650		90%		
	2	1	0	2	0	0	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	78.599.400			APBD	DP2KB P2	168.406.150	89.806.750	Untuk Kebutuhan Kekurangan Laptop, PC, AC	1 Paket	APBD
							<b>RINCIAN :</b>			<b>8.599.400</b>				<b>98.406.150</b>					
							Karbon Spesifikasi: Pembulatan			600					600	-			
							Kertas HVS Spesifikasi: Folio/F4 70Gram			272.400					272.400	-			
							Materai Spesifikasi: 10000			43.200					43.200	-			
							Printer Spesifikasi: Print, Scan, Copy, WiFi			8.283.200					8.283.200	-			
							Laptop Spesifikasi : Administrasi			-					39.286.500	39.286.500	Kekurangan Laptop untuk karyawan banyak yg rusak dan membawa laptop pribadi		
							AIO Desktop PC spesifikasi : Operator			-					24.316.600	24.316.600	PC Untuk kebutuhan administrasi kantor karna banyak tambahan pegawai		
							AC Split Spesifikasi : 1,5 PK Split			-					26.203.650	26.203.650	Banyak AC yg tidak bisa digunakan		

								SARPRAS UPTD PPA				70.000.000						70.000.000											
								Karbon Spesifikasi: Pembulatan				200						200			-								
								Kertas HVS Spesifikasi: Folio/F4 70Gram				272.400						272.400			-								
								Photo Copy Spesifikasi: Folio/hvs				34.400						34.400			-								
								LEMARI ARSIP Spesifikasi: W : 85 x D : 40 x H : 185 cm, Kaca Sleding, Besi				6.435.800						6.435.800			-								
								Kursi rapat Spesifikasi: CHOTOSE YUKI				11.016.000						11.016.000			-								
								Meja Rapat Spesifikasi: 250 cm x 60 cm x 125 cm				10.101.000						10.101.000			-								
								Ac Split Spesifikasi: 1,5 pk				13.295.200						13.295.200			-								
								Laptop Spesifikasi: Administrasi				13.095.500						13.095.500			-								
								Printer Spesifikasi: Multifungsi Print, Scan, Copy, Ecotank, Fax With Adf, Wifi				6.846.800						6.846.800			-								
								Mainan Anak Kreatif Spesifikasi: Set Alat Permainan Edukatif				2.225.700						2.225.700			-								
								Perosotan Spesifikasi: APE Luar PAUD				6.677.000						6.677.000			-								
	2	1	0	2	0	0		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	168 Paket		12.000.000						12.000.000			-				168 Paket			APBD	
								RINCIAN :																					

							Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifikasi : Standar 2			4.800.000					4.800.000	-						
							Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi : Standar 3			7.200.000					7.200.000	-						
2	1	0	2	0	0		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	14.761.100			APBD	DP2KB P2	27.318.000	12.556.900	Kebutuhan di lapangan yang masih kurang	4 Paket	APBD			
							<b>RINCIAN :</b>															
							Amplop Coklat Spesifikasi: 1/4 Folio			150.000					150.000	-						
							Lembar Disposisi Spesifikasi: Cetak			2.548.300					2.998.000	449.700						
							Blanko Spesifikasi: Kertas Folio, Kertas Buffalo			6.961.600					18.320.000	11.358.400						
							Cetak Map Dinas Spesifikasi: Bahan Kertas Buffalo			5.101.200					5.850.000	748.800						
2	1	0	2	0	0		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	7.180.800			APBD	DP2KB P2	7.180.800	-		6 Dokumen	APBD			
							<b>RINCIAN :</b>															
							Karbon Spesifikasi: Pembulatan			300					300	-						
							Kertas HVS Spesifikasi: Folio/F4 70Gram			68.100					68.100	-						
							Photo Copy Spesifikasi: Folio/hvs			56.400					56.400	-						

							Tarif Surat Kabar / Koran / Majalah Spesifikasi: Kategori 1			2.245.200					2.245.200	-				
							Tarif Surat Kabar / Koran / Majalah Spesifikasi: Kategori 1			2.245.200					2.245.200	-				
							Tarif Surat Kabar / Koran / Majalah Spesifikasi: Kategori 3			1.282.800					1.282.800	-				
							Tarif Surat Kabar / Koran / Majalah Spesifikasi: Kategori 3			1.282.800					1.282.800	-				
	2	1	0	2	0	0	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	33.721.825			APBD	DP2KB P2	33.721.825	-		4 Paket	APBD	
							<b>RINCIAN :</b>									-				
							<b>ATK - BIDANG DALDUK</b>			<b>2.401.950</b>					<b>2.401.950</b>	-				
							Amplop Putih Spesifikasi: Uk 95x150mm			159.900					159.900	-				
							Ballpoint Spesifikasi: Tulis			143.000					143.000	-				
							Binder Clip Spesifikasi: Besar			197.600					197.600	-				
							Binder Clip Spesifikasi: Kecil			79.200					79.200	-				
							Binder Clip Spesifikasi: Sedang			124.400					124.400	-				
							Box File Spesifikasi:			224.000					224.000	-				
							Buku Kwitansi Spesifikasi: Besar			133.500					133.500	-				
							Isi Staples Spesifikasi: Kecil			78.000					78.000	-				
							Karbon Spesifikasi: Pembulatan			3.000					3.000	-				







							Snelheker Plastik Spesifikasi: Inter X			240.000					240.000		-							
							Tinta Stempel Spesifikasi: 50 Cc			148.000					148.000		-							
							Tipe-X / Correction Spesifikasi: Cair			78.000					78.000		-							
							<b>KERTAS - BIDANG KS</b>			<b>204.300</b>					<b>204.300</b>		-							
							Kertas HVS Spesifikasi: Folio/F4 70Gram			204.300					204.300		-							
							<b>KERTAS - SEKRETARIAT - TU</b>			<b>9.882.000</b>					<b>9.882.000</b>		-							
							Kertas Hvs Spesifikasi: 70 Gram A4			293.250					293.250		-							
							Kertas HVS Spesifikasi: Folio/F4 70Gram			9.397.800					9.397.800		-							
							Kertas Hvs Spesifikasi: Warna, 70 Gram Folio/f4			185.400					185.400		-							
							Kertas Manila Spesifikasi: Warna			5.550					5.550		-							
							Tinta Printer Spesifikasi: Tinta Cair 70 Ml			8.385.000					8.385.000		-							
	2	1	0	2	0	0	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	4.000.000			APBD	DP2KB P2	4.000.000		-			12 Laporan	APBD			
							<b>RINCIAN :</b>																	
							Paket buah (loyang) Spesifikasi: 4 macam buah			220.000					220.000									
							Parcel Biasa Spesifikasi: 2 Minuman Ringan Dan 2 Macam Buah			3.780.000					3.780.000									

	2	1	0	2	0	0	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan	53.000.000			APBD	DP2KB P2	57.080.000	4.080.000	Kekurangan honor pengadaan barjas selama 6 bulan	137 Laporan	APBD	
							<b>RINCIAN :</b>													
							Karbon Spesifikasi: Pembulatan			800					800		-			
							Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai Pagu Dana Di Atas Rp. 2,5 Miliar Sd. Rp. 5 Miliar			26.520.000					26.520.000		-			
							Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi:			4.080.000					8.160.000	4.080.000				
							Penginapan Dalam Negeri - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi: D.K. I. JAKARTA			2.980.000					2.980.000		-			
							Tarif E-Tol Spesifikasi:			1.234.200					1.234.200		-			
							Tiket Pesawat Kelas Ekonomi Spesifikasi: ASN dan Non ASN			6.000.000					6.000.000		-			
							Uang Harian Dalam Negeri (Luar Kota) Spesifikasi: D.K.I. JAKARTA			1.060.000					1.060.000		-			
							Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi: Fungsional Umum Golongan II/I			550.000					550.000		-			

							Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi: Fungsional Umum Non Pegawai Negeri Sipil							750.000						750.000	-				
							Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon II.b							2.000.000						2.000.000	-				
							Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Pengawas Pemerintahan Madya/Auditor Madya							1.125.000						1.125.000	-				
							Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pengawas Pemerintahan Muda/Auditor Muda							1.050.000						1.050.000	-				
							Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon V dan Fungsional Umum Golongan IV/III/Pengawas Pemerintahan Pertama/Auditor Pertama							650.000						650.000	-				

							Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota Spesifikasi: Full Day/Half Day		5.000.000				5.000.000	-					
	2	1	0	2	0		<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan</b>	<b>90%</b>	<b>128.852.000</b>			<b>128.852.000</b>	-					
	2	1	0	2	0	0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	75.000.000			APBD	DP2KB P2	75.000.000	-		12 Laporan	APBD
							<b>RINCIAN :</b>												
							Karbon Spesifikasi: Pembulatan			70				70	-				
							Tarif Air PDAM Spesifikasi: Kantor Pemerintah Tingkat Kabupaten / Kota/ Provinsi			1.672.000				1.672.000	-				
							Tarif Listrik Pascabayar 0 S.D 999999999 Spesifikasi: Golongan Tarif P-3			57.961.170				57.961.170	-				
							Tarif Listrik Prabayar 451 s.d 900 Spesifikasi: Golongan Tarif P-1			6.612.760				6.612.760	-				
							Paket Internet,Telepon Rumah Dan Tv Interaktif Spesifikasi: 50 Mbps			8.754.000				8.754.000	-				

	2	1	0	2	0	0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	53.852.000			APBD	DP2KB P2	53.852.000	-		12 Laporan	APBD	
							<b>RINCIAN :</b>													
							Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi: Kantor DP2KBP2			2.154.080					2.154.080	-				
							Jasa Tenaga Keamanan Spesifikasi: Kantor Dp2Kbp2			25.848.960					25.848.960	-				
							Jasa Tenaga Supir Spesifikasi: DP2KBP2			25.848.960					25.848.960	-				
	2	1	0	2	0		<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase barang milih daerah dalam keadaan baik</b>	<b>90%</b>	<b>112.626.400</b>					<b>168.139.100</b>	<b>55.512.700</b>		<b>90%</b>		
	2	1	0	2	0	0	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	183 Unit	87.636.400			APBD	DP2KB P2	125.147.600	37.511.200	Kurangnya anggaran BBM Karena Kendaraan Dinas ada 6 Unit	183 Unit	APBD	
							<b>RINCIAN :</b>													
							Bensin Spesifikasi: Non Subsidi			6.981.750					10.753.500	3.771.750	Kurangnya anggaran BBM Karena Kendaraan Dinas ada 6 Unit			
							Oli Spesifikasi: Isi 1 Liter			6.507.900					10.330.000	3.822.100				



	2	1	0	2	0	0	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung	11.990.000			APBD	DP2KB P2	14.281.500	2.291.500	Perlunya sapu dan kantong plastik sampah untuk kebersihan kantor	2 Gedung	APBD	
							<b>RINCIAN :</b>													
							Cat Tembok Eksterior Spesifikasi: Berat Isi 2,5 Liter			463.000					463.000					
							Cat Tembok Spesifikasi: 5 Kg			2.290.600					2.290.600					
							Kuas Cat Spesifikasi: Uk. 4 Inch			72.600					72.600					
							Lampu LED			1.159.800					1.159.800					
							Lampu Led Spesifikasi: 18 Watt			700.700					700.700					
							Thinner Spesifikasi: Special A			658.200					658.200					
							Karbon Spesifikasi: Pembulatan			250					250					
							Banner Spesifikasi: Bahan Fronlite 280 Gr			1.043.050					1.043.050					
							Photo Copy Spesifikasi: Folio/hvs			32.800					32.800					
							Baterai Spesifikasi: Tanggung			765.900					765.900					
							Bendera Merah Putih Spesifikasi: Uk. 60 x 90 cm			1.443.000					1.443.000					



							Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi: Printer		4.140.000					10.350.000	6.210.000				
	2	0	0				<b>Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</b>	<b>Prosentase kelembagaan daerah yang responsif gender</b>	85,71%	187.393.000				187.393.000	-		85,71%		
	2	0	0	2	0		<b>Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota</b>	<b>Jumlah OPD yang melaksanakan anggaran responsif gender</b>	57 OPD	24.900.000				24.900.000	-		57 OPD		
	2	0	0	2	0	0	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	24.900.000			APBD	DP2KB P2	24.900.000	-		1 Dokumen	APBD
							<b>RINCIAN :</b>												
							Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifikasi: -			2.000.000					2.000.000				
							Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi:			3.000.000					3.000.000				
							Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III /Yang Disetarakan (intern Perangkat Daerah)			900.000					900.000				
							Moderator Lokal Spesifikasi:			350.000					350.000				



							Uang harian Spesifikasi: Bantuan transport peserta			5.700.000					5.700.000						
							Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota Spesifikasi: Full Day/Half Day			3.100.000					3.100.000						
	2	0	0	2	0	0	<b>Kegiatan Pemberdayaan perempuan bidang politik,hukum,so sial,dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah PEKKA dan perempuan korban Kekerasan yang dilatih berwiraswasta</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>112.743.000</b>					<b>112.743.000</b>	-			<b>3 Dokumen</b>	<b>APBD</b>	
	2	0	0	2	0	0	Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	112.743.000			APBD	DP2KB P2	112.743.000				1 Dokumen	APBD	
							<b>RINCIAN :</b>														
							Ballpoint Spesifikasi: Tulis			286.000					286.000						
							Buku Block Note Spesifikasi: Isi 50 Lembar			286.000					286.000						
							Map Spesifikasi: Kantong			360.000					360.000						
							Karbon Spesifikasi: Pembulatan			250					250						



								Biaya Konsumsi (Makan)			2.100.000							2.100.000							
								Spesifikasi:																	
								Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack)			600.000								600.000						
								Spesifikasi:																	
								Biaya Konsumsi (Makan)			900.000								900.000						
								Spesifikasi:																	
								Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack)			2.600.000								2.600.000						
								Spesifikasi:																	
								Biaya Konsumsi (Makan)			3.900.000								3.900.000						
								Spesifikasi:																	
								Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack)			4.000.000								4.000.000						
								Spesifikasi:																	
								Biaya Konsumsi (Makan)			6.000.000								6.000.000						
								Spesifikasi:																	
								Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack)			4.000.000								4.000.000						
								Spesifikasi:																	
								Biaya Konsumsi (Makan)			6.000.000								6.000.000						
								Spesifikasi:																	
								Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack)			1.040.000								1.040.000						
								Spesifikasi:																	
								Biaya Konsumsi (Makan)			1.560.000								1.560.000						
								Spesifikasi:																	
								Air Mineral			1.053.000								1.053.000						
								Spesifikasi:																	
								Kemasan Botol 330																	
								MI																	
								Moderator			1.400.000								1.400.000						
								Spesifikasi:																	
								Narasumber			6.800.000								6.800.000						
								Spesifikasi: Pakar,																	
								Praktisi, Atau																	

							Pembicara Khusus, Profesional												
							Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon IV kebawah /yang disetarakan		800.000				800.000						
							Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai Pagu Dana Diatas Rp. 250 Juta Sd. Rp. 500 Juta		12.690.000				12.690.000						
							Bahan Bakar Spesifikasi: Pertamax		1.757.700				1.757.700						
							Bahan Bakar Spesifikasi: Pertamax		207.900				207.900						
							Uang harian Spesifikasi: Bantuan transport peserta		4.000.000				4.000.000						
							Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota Spesifikasi: Full Day/Half Day		1.000.000				1.000.000						
							Bahan Bakar Spesifikasi: Pertamax		1.852.200				1.852.200						
	2	0	0	2	0	3	<b>Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota</b>	<b>Jumlah organisasi wanita dan lembaga penyedia layanan yang mendapat pembinaan</b>	<b>90 orang</b>	<b>49.750.000</b>		<b>APBD</b>	<b>DP2K BP2</b>	<b>49.750.000</b>					

	2	0	0	2	0	0	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	3 Lembaga	49.750.000			APBD	DP2KB P2	49.750.000			1 Lembaga	APBD	
							<b>RINCIAN :</b>													
							Ballpoint Spesifikasi: Tulis			500.500					500.500					
							Buku Block Note Spesifikasi: Isi 50 Lembar			500.500					500.500					
							Map Spesifikasi: Kantong			630.000					630.000					
							Karbon Spesifikasi: Pembulatan			200					200					
							Karbon Spesifikasi: Pembulatan			200					200					
							Karbon Spesifikasi: Pembulatan			250					250					
							Kertas Hvs Spesifikasi: 80 Gram Folio/f4			151.200					151.200					
							Photo Copy Spesifikasi: Folio/hvs			50.800					50.800					
							Photo Copy Spesifikasi: Folio/hvs			120.800					120.800					
							Banner Spesifikasi: Bahan Fronlite 280 Gr			226.750					226.750					
							Photo Copy Spesifikasi: Folio/hvs			58.800					58.800					
							Kain Batik Spesifikasi: Stempel			21.180.000					21.180.000					





2	0	0	2	0	0	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000			APBD	DP2KB P2	50.000.000	-		1 Dokumen	APBD	
						<b>RINCIAN :</b>													
						Karbon Spesifikasi: Pembulatan			200					200	-				
						Karbon Spesifikasi: Pembulatan			1.400					1.400	-				
						Ballpoint Spesifikasi: Tulis			286.000					286.000	-				
						Buku Block Note Spesifikasi: Isi 50 Lembar			286.000					286.000	-				
						Map Spesifikasi: Kantong			360.000					360.000	-				
						Ballpoint Spesifikasi: Tulis			286.000					286.000	-				
						Buku Block Note Spesifikasi: Isi 50 Lembar			286.000					286.000	-				
						Map Spesifikasi: Kantong			360.000					360.000	-				
						Kertas Hvs Spesifikasi: 80 Gram Folio/f4			907.200					907.200	-				
						Photo Copy Spesifikasi: Folio/hvs			13.600					13.600	-				

								Banner Spesifikasi: Bahan Fronlite 280 Gr			453.500						453.500	-					
								Banner Spesifikasi: Bahan Fronlite 280 Gr			453.500							453.500	-				
								Moderator Spesifikasi:			2.100.000							2.100.000	-				
								Narasumber Spesifikasi: Pakar, Praktisi, Atau Pembicara Khusus, Profesional			13.600.000							13.600.000	-				
								Moderator Spesifikasi:			2.100.000							2.100.000	-				
								Narasumber Spesifikasi: Pakar, Praktisi, Atau Pembicara Khusus, Profesional			13.600.000							13.600.000	-				
								Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi: Fungsional Umum Non Pegawai Negeri Sipil			1.250.000							1.250.000	-				
								Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Pengawas Pemerintahan Madya/Auditor Madya			3.750.000							3.750.000	-				
								Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pengawas Pemerintahan			2.800.000							2.800.000	-				

							Muda/Auditor Muda												
							Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon V dan Fungsional Umum Golongan IV/III/Pengawas Pemerintahan Pertama/Auditor Pertama		3.575.000				3.575.000	-					
							Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota Spesifikasi: Full Day/Half Day		2.700.000				2.700.000	-					
							Bahan Bakar Spesifikasi: Pertamina		415.800				415.800	-					
							Bahan Bakar Spesifikasi: Pertamina		415.800				415.800	-					
	2	0	0	2	0	0	<b>Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten / Kota</b>	<b>Jumlah Mitra Kerja / Jejaring yang Dapat Bersinergi dengan P2TP2A</b>	<b>15 mitra kerja / jejaring</b>	<b>48.000.000</b>			<b>48.000.000</b>	-					
	2	0	0	2	0	0	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan	5 Orang	48.000.000		APBD	DP2KB P2	48.000.000	-		5 Orang	APBD	



							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak			1.065.600					1.065.600							
							Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifikasi: -			4.000.000					4.000.000							
							Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi:			6.000.000					6.000.000							
							Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III /Yang Disetarakan (intern Perangkat Daerah)			450.000					450.000							
							Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II /Yang Disetarakan (intern Perangkat Daerah)			500.000					500.000							
							Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya			1.700.000					1.700.000							
							Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai Pagu Dana Diatas Rp. 100 Juta S.D Rp. 250 Juta			10.890.000					10.890.000							
							Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota Spesifikasi: Full Day/Half Day			1.100.000					1.100.000							
	2	0	0				<b>Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)</b>	<b>Prosentase kecamatan layak anak</b>	<b>50,00%</b>	<b>18.000.000</b>					<b>55.980.000</b>	<b>37.980.000</b>	<b>0</b>					

								Prosentase desa kelurahan layak anak	14,47%											
	2	0	0	2	0			Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah jejaring yang bersinergi dalam pemenuhan hak anak di Kabupaten Mojokerto	125 Orang	18.000.000					55.980.000	37.980.000			
	2	0	0	2	0	0		Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	95 Anak	9.000.000			APBD	DP2KB P2	46.980.000	37.980.000	Untuk tambahan anggaran kebutuhan forum anak majapahit (Pengukuhan forum anak periode 2025 - 2027)	95 Anak	APBD
								<b>RINCIAN :</b>												
								Karbon Spesifikasi: Pembulatan			26.950					26.950	-			
								Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover			817.200					817.200	-			
								Banner Spesifikasi: Bahan Fronlite 340 Gr			785.250					785.250	-			
								Sertifikat Spesifikasi: Bahan Linen			417.500					417.500	-			
								Tinta Printer Spesifikasi: Tinta Cair 70 Ml			503.100					503.100	-			



							Spesifikasi: Full Day/Half Day												
							Belanja Makanan dan Minuman Rapat		-					7.500.000	7.500.000				
							Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Sragam batik forum anak)		-					21.180.000	21.180.000	0			
							Honorarium Rohaniawan		-					300.000	300.000				
							Narasumber/Pembahas Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah Lainnya Yang Disetarakan		-					1.400.000	1.400.000				
							Pembawa Acara		-					400.000	400.000				
2	0	0	2	0	0		Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	9.000.000			APBD	DP2KB P2	9.000.000	-		1 Dokumen	APBD
							<b>RINCIAN :</b>												
							Karbon Spesifikasi: Pembulatan			18.000				18.000	-				
							Kertas HVS Spesifikasi: Folio/F4 70Gram			681.000				681.000	-				

							Sertifikat Spesifikasi: Bahan Linen			501.000					501.000	-				
							Moderator Lokal Spesifikasi:			350.000					350.000	-				
							Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II /Yang Disetarakan (intern Perangkat Daerah)			500.000					500.000	-				
							Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya			1.700.000					1.700.000	-				
							Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Pengawas Pemerintahan Madya/Auditor Madya			750.000					750.000	-				
							Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pengawas Pemerintahan Muda/Auditor Muda			1.400.000					1.400.000	-				
							Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi: Fungsional Umum Non Pegawai Negeri Sipil			1.000.000					1.000.000	-				

							Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota Spesifikasi: Full Day/Half Day		2.100.000					2.100.000	-				
	2	0	0				<b>Program Perlindungan Khusus Anak</b>	<b>Prosentase korban anak dan ABH (anak yang berhadapan dengan hukum) yang mendapatkan layanan</b>	<b>100,00%</b>	<b>75.000.000</b>				<b>85.000.000</b>	<b>10.000.000</b>				
	2	0	0	2	0	0	<b>Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Jumlah lintas sektor dan remaja yang berperan aktif dalam pencegahan terhadap anak atau TPPO</b>	<b>30 orang</b>	<b>8.500.000</b>				<b>8.500.000</b>	-				
	2	0	0	2	0	0	Sub Kegiatan Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	15 Orang	8.500.000			APBD	DP2KB P2	8.500.000	-		10 Orang	APBD
							<b>RINCIAN :</b>												
							Karbon Spesifikasi: Pembulatan			19.450					19.450				
							Banner Spesifikasi: Bahan Fronlite 340 Gr			680.550					680.550				
							Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifikasi:			500.000					500.000				



							Daerah Kabupaten/Kota													
							<b>RINCIAN :</b>													
							Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi: Fungsional Umum Non Pegawai Negeri Sipil		500.000					500.000		-				
							Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Pengawas Pemerintahan Madya/Auditor Madya		1.500.000					1.500.000		-				
							Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pengawas Pemerintahan Muda/Auditor Muda		2.100.000					2.100.000		-				
							Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota Spesifikasi: Full Day/Half Day		5.900.000					15.900.000		10.000.000				
	2	0	0	2	0	0	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	10 Layanan	8.500.000			APBD	DP2KB P2	8.500.000	-			10 Layanan	APBD
							<b>RINCIAN :</b>													

							Karbon Spesifikasi: Pembulatan			11.800						11.800	-				
							Kertas Hvs Spesifikasi: 80 Gram Folio/f4			542.400						542.400	-				
							Tinta Printer Spesifikasi: Tinta Cair 70 ML			670.800						670.800	-				
							Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Pengawas Pemerintahan Madya/Auditor Madya			1.125.000						1.125.000	-				
							Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pengawas Pemerintahan Muda/Auditor Muda			1.400.000						1.400.000	-				
							Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi: Fungsional Umum Non Pegawai Negeri Sipil			750.000						750.000	-				
							Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota Spesifikasi: Full Day/Half Day			3.000.000						3.000.000	-				
							Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota Spesifikasi: Full Day/Half Day			1.000.000						1.000.000	-				

	2	0	0	2	0		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Kepala Desa yang Memahami Desa Layak Anak	108 orang	48.000.000				48.000.000	-				
	2	0	0	2	0	0	Sub Kegiatan Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	1 Kegiatan	48.000.000			APBD	DP2KB P2	48.000.000	-		1 Kegiatan	APBD
							<b>RINCIAN :</b>												
							Jasa Tenaga Penanganan Sosial Spesifikasi: Petugas Fulltimer P2TP2A pada DP2KBP2			48.000.000					48.000.000				
	2	1	0				<b>Program Pengendalian Penduduk</b>	<b>Prosentase Data Program Bangga Kencana dan Data Keluarga yang dilaporkan</b>	<b>100%</b>	<b>1.580.400.000</b>					<b>1.580.400.000</b>	-			
	2	1	0	2	0		Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Petugas KKBPK dan Lintas Sektor yang Melaksanakan Koordinasi Program KKBPK	100 orang	80.000.000					80.000.000	-			

	2	1	0	2	0	0	Sub Kegiatan Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	70.000.000			APBD	DP2KB P2	70.000.000	-		1 Dokumen	APBD	
							<b>RINCIAN :</b>													
							Karbon Spesifikasi: Pembulatan			300					300	-				
							Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifikasi:			2.400.000					2.400.000	-				
							Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi:			3.600.000					3.600.000	-				
							Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III /Yang Disetarakan (intern Perangkat Daerah)			450.000					450.000	-				
							Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II /Yang Disetarakan (intern Perangkat Daerah)			500.000					500.000	-				
							Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon IV /Yang Disetarakan (intern Perangkat Daerah)			400.000					400.000	-				
							Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai Pagu Dana Sd. Rp. 100 Juta			1.010.000					1.010.000	-				



							Upah / Gaji Tenaga Ahli/ Konsultan Kegiatan Penelitian/ Kajian Analisa/ Studi (S-2 - S-3) Ahli Muda Spesifikasi: Pengalaman 1 Thn Sd 4 Thn			20.800.000				20.800.000	-												
							Upah Tenaga Surveyor / Drafter / Administrasi /Studi (SMA/SMK - D3) Spesifikasi: Pengalaman 1 thn sd 4 thn			4.000.000				4.000.000	-												
							Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota Spesifikasi: Full Day/Half Day			5.600.000				5.600.000	-												
	2	1	0	2	0	1	Sub Kegiatan Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	1 Kegiatan	10.000.000		APBD	DP2KB P2	10.000.000	-			1 Kegiatan	APBD								
							<b>RINCIAN :</b>																				
							Bahan Bakar Spesifikasi: Pertamina			472.500				472.500													
							Karbon Spesifikasi: Pembulatan			300				300													
							Photo Copy Spesifikasi: Folio/hvs			17.200				17.200													



							Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota Spesifikasi: Full Day/Half Day		3.300.000					3.300.000							
	2	1 4	0 2	2	0 2		<b>Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Jumlah Perkiraan Pengendalian Penduduk Tahun 2023 yang Dipetakan</b>	<b>1.169.760 jiwa</b>	<b>1.500.400.0 00</b>				<b>1.500.400.0 00</b>	-						
	2	1 4	0 2	2	0 2	0 9	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarg	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarg	1 Laporan	60.000.000			DAK	DP2KB P2	60.000.000	-			DAK		
							<b>RINCIAN :</b>														
							Ballpoint Spesifikasi: Tizo gel			245.700					245.700						
							Binder Clip Spesifikasi: Sedang			404.300					404.300						
							Karbon Spesifikasi: Pembulatan			4.600					4.600						
							Kertas HVS Spesifikasi: Folio/F4 70Gram			12.802.800					12.802.800						
							Materai Spesifikasi: 10000			1.728.000					1.728.000						
							Tinta Printer Spesifikasi: Tinta Cair 70 Ml			16.434.600					16.434.600						
							Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifikasi:			1.080.000					1.080.000						
							Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi:			1.620.000					1.620.000						
							Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi:			680.000					680.000						

							Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota Spesifikasi: Full Day/Half Day		25.000.000								25.000.000							
	2	1	0	2	0	1	Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	242.400.000			APBD/ DAK	DP2KB P2	242.400.000	-				APBD/ DAK				
							<b>RINCIAN :</b>																	
							Honor Pelaksanaan Pemutakhiran Data di Wilayah Kerja oleh Kader Spesifikasi: DAK Non Fisik DP2KBP2 Kab. Mojokerto			182.400.000					182.400.000									
							Honor Petugas Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan KB di Fasyankes Spesifikasi: DAK Non Fisik DP2KBP2 Kab. Mojokerto			60.000.000					60.000.000									
	2	1	0	2	1		Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	1.188.000.00 0			DAK	DP2KB P2	1.188.000.00 0	-			1 Dokumen	DAK				
							<b>RINCIAN :</b>																	
							LANGGANAN INTERNET SATELIT Spesifikasi: DAK Non Fisik DP2KBP2 Kab. Mojokerto			1.080.000.00 0					1.080.000.00 0									

							Transport Pengolah Data Spesifikasi: DAK Non Fisik DP2KBP2 Kab. Mojokerto		108.000.000					108.000.000					
	2	1	0	2	1		Sub Kegiatan Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	18 Unit	10.000.000			APBD	DP2KB P2	10.000.000	-		18 Unit	APBD
							<b>RINCIAN :</b>												
							Karbon Spesifikasi: Pembulatan		200						200				
							Kertas HVS Spesifikasi: Folio/F4 70Gram		3.541.200						3.541.200				
							Photo Copy Spesifikasi: Folio/hvs		13.200						13.200				
							Materai Spesifikasi: 10000		158.400						158.400				
							Tinta Printer Spesifikasi: Tinta Cair 70 Ml		1.677.000						1.677.000				
							Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi: Nilai Pagu Dana Sd. Rp. 100 juta		1.010.000						1.010.000				

							Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota Spesifikasi: Full Day/Half Day		3.600.000					3.600.000						
	2	1	0				<b>Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</b>	<b>Prosentase PUS yang mendapat pelayanan Keluarga Berencana</b>	<b>80,58%</b>	<b>6.198.500.00</b>				<b>6.693.500.00</b>	<b>495.000.00</b>		<b>80,58%</b>			
	2	1	0	2	0		<b>Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal</b>	<b>Jumlah media komunikasi program KKBPK</b>	<b>144 orang</b>	<b>1.626.000.00</b>				<b>1.626.000.00</b>	<b>-</b>		<b>144 orang</b>			
	2	1	0	2	0	0	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	9.000.000			APBD	DP2KB P2	9.000.000	-		1 Laporan	APBD	
							<b>RINCIAN :</b>													
							Karbon Spesifikasi: Pembulatan			200					200					
							Jilid Spesifikasi: Cover Mika / Bufalo			40.200					40.200					
							Photo Copy Spesifikasi: Folio/hvs			729.600					729.600					
							Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Spesifikasi:			680.000					680.000					
							Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon II.b			800.000					800.000					

							Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon III/Pengawas Pemerintahan Madya/Auditor Madya		750.000					750.000					
							Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon IV/Pengawas Pemerintahan Muda/Auditor Muda		350.000					350.000					
							Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon V dan Fungsional Umum Golongan IV/III/Pengawas Pemerintahan Pertama/Auditor Pertama		650.000					650.000					
							Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota Spesifikasi: Full Day/Half Day		5.000.000					5.000.000					
	2	1	0	2	0	1	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		882.000.000	34 Laporan		DAK	DP2KB P2	882.000.000	-		34 Laporan	DAK



2	1	0	2	0	1	1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	10 Laporan	360.000.000			DAK	DP2KB P2	360.000.000	-		10 Laporan	DAK	
							<b>RINCIAN :</b>													
							Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifikasi:				61.200.000				61.200.000					
							Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi:				91.800.000				91.800.000					
							Honor Fasilitator Spesifikasi: DAK Non Fisik Dp2Kbp2 Kabupaten Mojokerto				72.000.000				72.000.000					
							Biaya Transport Peserta BOKB Spesifikasi: DAK NON FISIK DP2KBP2 KABUPATEN MOJOKERTO				135.000.000				135.000.000					

	2	1	0	2	0	1	Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	2 Dokumen	125.000.000			DAK	DP2KB P2	125.000.000	-		2 Dokumen	DAK		
							<b>RINCIAN :</b>														
							Karbon Spesifikasi: Pembulatan			3.400					3.400						
							Banner Spesifikasi: Bahan Fronlite 280 Gr			70.564.600					70.564.600						
							Leaflet Spesifikasi: Flyer Ukuran A4, Cetak Full Colour bahan Art Paper 150 gram, Finishing UV			45.000.000					45.000.000						
							Poster A3 Spesifikasi: Uk A3, Cetak 1 Muka, Full Warna			3.020.000					3.020.000						
							Publikasi Elektronik (Radio, Dll) Spesifikasi: 60 Detik			6.412.000					6.412.000						
	2	1	0	2	0	1	Sub Kegiatan Advokasi Program Bangga Kencana kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga	1 Organisasi	250.000.000			DAK		250.000.000	-		1 Organisasi	DAK		



	2	1	0	2	0		Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB / PLKB)	Jumlah PLKB yang Mendapat Pembinaan Program KKBP	60 Orang	2.010.850.00					2.505.850.00	495.000.00		60 Orang		
	2	1	0	2	0	0	Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	304 Orang	1.070.650.00			DAK	DP2KB P2	1.070.650.00	-		304 Orang	DAK	
							<b>RINCIAN :</b>													
							Photo Copy Spesifikasi: Folio/hvs			10.000					10.000					
							Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifikasi			1.070.640.00					1.070.640.00					
	2	1	0	2	0	0	Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program KKBP di Lini Lapangan oleh PKB / PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	2 Organisasi	778.200.000			APBD	DP2KB P2	1.273.200.00	495.000.00	Honorarium Rutin PPKBD selama 5 dan Sub PPKBD selama 5 bulan	2 Organisasi	APBD	
							<b>RINCIAN :</b>													
							Amplop Putih Spesifikasi: Uk 114x160mm			55.500					55.500	-				
							Ballpoint Spesifikasi: Tulis			143.000					143.000	-				
							Binder Clip Spesifikasi: Besar			988.000					988.000	-				
							Binder Clip Spesifikasi: Sedang			311.000					311.000	-				

							Buku Kwitansi Spesifikasi: Besar			66.750					66.750	-								
							Isi Staples Spesifikasi: Kecil			156.000					156.000	-								
							Karbon Spesifikasi: Pembulatan			50					50	-								
							Map Spesifikasi: Kantong			180.000					180.000	-								
							Paper Clips Spesifikasi: Kecil			123.000					123.000	-								
							Paper Clips Spesifikasi: Sedan			184.000					184.000	-								
							Post It / Sticky Note Spesifikasi: Plastik			245.000					245.000	-								
							Kertas HVS Spesifikasi: Folio/F4 70Gram			544.800					544.800	-								
							Photo Copy Spesifikasi: Folio/hvs			736.800					736.800	-								
							Materai Spesifikasi: 10000			1.036.800					1.036.800	-								
							Tinta Printer Spesifikasi: Tinta Cair 70 Ml			1.509.300					1.509.300	-								
							Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifikasi:			720.000					720.000	-								
							Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi:			1.080.000					1.080.000	-								
							Honorarium Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Ppkbd) Spesifikasi: Non PNS			159.600.000					273.600.000	114.000.000								



						Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi: Pejabat Eselon V dan Fungsional Umum Golongan IV/III/Pengawas Pemerintahan Pertama/Auditor Pertama			12.025.000				12.025.000	-									
						Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota Spesifikasi: Full Day/Half Day			18.000.000				18.000.000	-									
2	1	0	2	0	0	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (DAK FISIK)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1 Laporan	162.000.000			APBD	DP2KB P2	162.000.000	-			1 Laporan	APBD				
						<b>RINCIAN :</b>																	
						Tenaga Penunjang Kegiatan Peningkatan KB MKJP Spesifikasi: APBD DP2KBP2 Kab. Mojokerto			162.000.000					162.000.000									

	2	1	0	2	0		Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi yang terdistribusikan serta pelaksanaan pelayanan KB di Kabupaten Mojokerto yang terlayani sesuai SOP	26.929 alokon	2.024.050.000				2.024.050.000	-		26.929 alokon			
	2	1	0	2	0	0	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	30.000.000			DAK	DP2KB P2	30.000.000	-		1 Laporan	DAK	
							<b>RINCIAN :</b>													
							Bahan Bakar Spesifikasi: Pertamina			9.000.000										
							Solar Spesifikasi: Non Subsidi			21.000.000										
	2	1	0	2	0	0	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang	Jumlah orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	3555 Orang	1.943.050.000			DAK	DP2KB P2	1.943.050.000	-		3555 Orang	APBD/ DAK	Koordinasi dan Pengambilan alkon di BKKBN Propinsi
							<b>RINCIAN :</b>													

								Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifikasi:			300.000					300.000								
								Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi:			450.000					450.000								
								Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifikasi:			12.000.000					12.000.000								
								Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi:			18.000.000					18.000.000								
								Jasa Pelayanan KB Implan Spesifikasi: DAK Non Fisik DP2KBP2 Kab. Mojokerto			525.000.000					525.000.000								
								Jasa Pelayanan KB IUD Spesifikasi: DAK Non Fisik DP2KBP2 Kab. Mojokerto			105.000.000					105.000.000								
								Jasa Pelayanan KB MOP Spesifikasi: Dak Non Fisik DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto			3.000.000					3.000.000								
								Jasa Pelayanan KB MOW Spesifikasi: Dak Non Fisik DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto			507.000.000					507.000.000								
								Jasa Pelayanan KB Pencabutan Implan Spesifikasi: DAK Non Fisik DP2KBP2 Kab. Mojokerto			61.425.000					61.425.000								
								Transport Pembawa Akseptor KB Implan Spesifikasi: Dak Non Fisik DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto			375.000.000					375.000.000								

							Transport Pembawa Akseptor KB IUD Spesifikasi: Dak Non Fisik DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto			75.000.000					75.000.000				
							Biaya Pengganti Tidak Bekerja Spesifikasi: DAK Non Fisik DP2KBP2 Kab. Mojokerto			2.250.000					2.250.000				
							Transport Pembawa Akseptor KB MOP Spesifikasi: Dak Non Fisik DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto			750.000					750.000				
							Transport Pembawa Akseptor KB MOW Spesifikasi: Dak Non Fisik DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto			30.000.000					30.000.000				
							Transport Pembawa Akseptor Pencabutan Implan Spesifikasi: Dak Non Fisik DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto			43.875.000					43.875.000				
							IUD KIT Spesifikasi: DAK FISIK DP2KBP2 KABUPATEN MOJOKERTO			184.000.000					184.000.000				
	2	1	0	2	0	0	Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk	2 Laporan	51.000.000			DAK	DP2KB P2	51.000.000	-		2 Laporan	DAK

									Jaringan dan Jejaringnya											
									<b>RINCIAN :</b>											
									Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifikasi			3.800.000						3.800.000		
									Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi:			5.700.000						5.700.000		
									Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifikasi: -			2.000.000						2.000.000		
									Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi:			3.000.000						3.000.000		
									Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota Spesifikasi: Full Day/Half Day			19.000.000						19.000.000		
									Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota Spesifikasi: Full Day/Half Day			17.500.000						17.500.000		

	2	1	0	2	0		Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang mensosialisasikan program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana)	1829 PPKBD dan Sub PPKBD	537.600.000				537.600.000	-		1829 PPKBD dan Sub PPKBD		
	2	1	0	2	0	0	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	96 Kampung	537.600.000			DAK	DP2KB P2	537.600.000	-		96 Kampung	DAK
							<b>RINCIAN :</b>												
							Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifikasi:			12.540.000					12.540.000	-			
							Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi:			18.810.000					18.810.000	-			
							Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifikasi:			1.820.000					1.820.000	-			
							Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi:			2.730.000					2.730.000	-			
							Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifikasi:			86.400.000					86.400.000	-			

									Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi:				129.600.000						129.600.000	-						
									Honor Fasilitator Spesifikasi: DAK Non Fisik Dp2Kbp2 Kabupaten Mojokerto				3.200.000						3.200.000	-						
									Honor Fasilitator Spesifikasi: DAK Non Fisik Dp2Kbp2 Kabupaten Mojokerto				800.000						800.000	-						
									Uang harian Spesifikasi: Bantuan transport peserta				56.700.000						56.700.000	-						
									Uang harian Spesifikasi: Bantuan transport peserta				9.000.000						9.000.000	-						
									Transport Rapat Kampung KB Spesifikasi: Dak Non Fisik DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto				216.000.000						216.000.000	-						
	2	1	0						<b>Program Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</b>	<b>Prosentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif</b>	<b>97,91%</b>	<b>5.879.200.000</b>						<b>5.879.200.000</b>	-							
	2	1	0	2	0				<b>Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	<b>Jumlah Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R yang Mendapat Pembinaan</b>	<b>934 Kelompok</b>	<b>190.000.000</b>						<b>190.000.000</b>	-					<b>934 Kelompok</b>		

	2	1	0	2	0	1	Sub Kegiatan Pengelolaan ketahanan keluarga melalui pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS)	Jumlah Laporan hasil pengelolaan ketahanan keluarga melalui pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS)	5 Laporan/Dokumen	10.000.000			DAU	DP2KB P2	10.000.000	-		5 Laporan/Dokumen	DAU	
							<b>RINCIAN :</b>													
							Banner Spesifikasi: Bahan Vinyl 240 Gr			419.250					419.250					
							Karbon Spesifikasi: Pembulatan			350					350					
							Photo Copy Spesifikasi: Folio/hvs			30.400					30.400					
							Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifikasi:			1.300.000					1.300.000					
							Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi:			1.950.000					1.950.000					
							Rompi Lapangan Spesifikasi: Jenis Kain Cotton + Bordir			2.950.000					2.950.000					
							Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon III /Yang Disetarakan (intern Perangkat Daerah)			450.000					450.000					
							Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II /Yang Disetarakan (intern Perangkat Daerah)			500.000					500.000					
							Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon IV /Yang Disetarakan (intern Perangkat Daerah)			400.000					400.000					

							Uang harian Spesifikasi: Bantuan transport peserta		2.000.000				2.000.000						
-	2	1	0	2	0	1	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	25 Laporan	130.000.000			DAK	DP2KB P2	130.000.000	-		25 Laporan	DAK
							<b>RINCIAN :</b>												
							BKB KIT STUNTING Spesifikasi: DAK Non Fisik DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto		130.000.000				130.000.000						
-	2	1	0	2	0	1	Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatih an Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	25 Orang	50.000.000			APBD	DP2KB P2	50.000.000	-		25 Orang	APBD
							<b>RINCIAN :</b>												
							Kertas HVS Spesifikasi: Folio/F4 70Gram		1.089.600				1.089.600						









## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 ini merupakan penjabaran / pelaksanaan dari tugas pokok dan fungsi yang diaplikasikan kedalam rencana kegiatan tahunan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2025 - 2029, Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan tahun 2025 - 2029.

Kami menyadari bahwa penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan dan membutuhkan perbaikan. Untuk itu kritik dan saran perbaikan sangat kami harapkan sehingga dimasa depan menjadi lebih baik. Mudah-mudahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan ini dapat memberikan manfaat bagi public atau masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang telah memberikan mandate kepada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto ini merupakan dokumen perencanaan yang diharapkan dapat memberikan arahan untuk memudahkan pengukuran serta pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto ini disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan dengan menggunakan data dan informasi yang akurat, sebagai bahan-bahan dalam penentuan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan.

Semoga Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2025 ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkesinambungan dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih dan berwibawa.

#### **1.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan**

Sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Di dalam Penyusunan Rencana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Jawa Timur maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten Mojokerto, RPJMD Kabupaten Mojokerto, RKPD Kabupaten Mojokerto.

## **1.2. Rencana Tindak Lanjut**

1. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencanaan.
2. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
3. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
4. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dan dijabarkan dalam Renja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan diatas, dengan tekad mensukseskan pembangunan di Kabupaten Mojokerto serta adanya dukungan dari semua pihak, kami percaya dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan di pundak kami. Sebagai manusia kami tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan, untuk itu sumbang saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

Mojokerto,       Maret 2025

KEPALA DP2KBP2 KAB.MOJOKERTO

SUGENG NURYADI, S.IP.,MM

Pembina Tk.I

NIP. 19681010 198903 1 008